



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**



**HERU PRATAMA**  
**07 951 005**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah yang secara tertulis disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, 10 Agustus 2011



Heru Pratama  
NIM : 07 951 005



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otonoda) di Kabupaten Agam**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ekonomi Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, dukungan serta perhatian yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. **Ayahanda dan Ibunda tercinta, Wirmansyah, S.sos dan Dewi Ani Berti, S.Pd.** yang telah memberikan pengorbanan, nasehat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
2. **Bapak Prof.Dr.H. Syafruddin Karimi, SE.MA.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

3. **Bapak Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE.M.Ec.DEA.Ing.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. **Ibu Neng Kamarni, SE.M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. **Bapak Dr.Hefrizal Handra, M.Soc. Sc** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. **Ibu Neng Kamarni, SE.M.Si. dan Ibu Sosmiarti, SE.M.Si** selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam seminar hasil sekaligus memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
9. Keluarga tercinta : **Helen Pratiwi, Amd.keb (Unang)** dan **Harry Prakarsa (Uyunk)** Terima kasih atas semua keceriaan, tawa, canda dan semangat yang tak pernah padam kalian berikan.

1. My Lovely ☆ ©<sup>a</sup> Ade Nofia Deslita, SE. ♥ Yesterday is History, Today is a Gift & Tomorrow is Mystery ^\_^
2. Community IE-FEUA 07: Pak Ouwyon, Daf“agan”, Rizkie“ujank”, feris“JON”, Cia, i\_C, Au, Olga, Ika, Tika, Funny, Lucky Cs, Ade Cs, , IyuL Cs, Defitavina, Rendy“Pharjon” Cs, etc, Nice to meet u all. ☺
3. Clan Delta Force: Febri“PONO”, Deo“jangArt”, Arieisme, Rori“Brur”, Jimmy“Rambo”, Dedi“botak”, Abez“tante Luna”, Agus, Amaik, Dio, etc, Thanks For all.
4. IFC “Inyak Football Club” : Jerry“Pak RT”, Edo, Buyunk, Bos Petra, Dio, Rian, Rully, Eric, Adi, Kikie “buntal”, Dek windy, Haris. Etek, Tya(buk Kost), etc, Thanks For all, sorry for my mistakes. ☺

Semoga Allah swt membalas pengorbanan dan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, 10 Agustus 2011



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	-
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Tujuan .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi dan Daerah .....	9
2.1.2 Otonomi Daerah .....	11
2.1.2.1 Konsep Dasar.....	11
2.1.2.2 Otonomi dalam Konsep Ekonomi .....	12
2.1.3 Keuangan Daerah .....	13



2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	18
2.1.5 Kemampuan Keuangan Daerah .....	22
2.1.6 Hubungan antara PAD dengan APBD.....	24
2.1.7 Elastisitas PAD .....	32
2.1.8 Efektifitas PAD.....	33
2.1.9 Efisiensi PAD .....	33
2.2 Penelitian Terdahulu .....	34
2.3 Kerangka Pemikiran .....	35
2.4 Hipotesis .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Metode Penelitian.....	38
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.3 Metode Analisis Data .....	39
3.4 IKBR dan IKBP Kabupaten Agam .....	39
3.5 Elastisitas PAD terhadap Perubahan APBD di Kabupaten Agam .....	40
3.6 Efisiensi PAD Kabupaten Agam.....	41
3.7 Efektifitas PAD Kabupaten Agam .....	41
3.4 Uji Compare Mean ( Uji Beda T-Paired) .....	42
3.3 Operasional Variabel.....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN AGAM .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kondisi Fisik .....	45
4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk .....	47
4.3 Struktur Perekonomian.....	49

4.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	52
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Agam.....	55
5.1.1 Indeks Kemampuan Belanja Rutin (IKBR).....	55
5.1.2 Uji Beda terhadap IKBR .....	58
5.1.3 Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan (IKBP) .....	60
5.1.4 Uji Beda terhadap IKBP .....	63
5.2 Elastisitas PAD Kabupaten Agam.....	65
5.3 Uji Beda terhadap Elastisitas .....	68
5.4 Efisiensi PAD Kabupaten Agam.....	69
5.5 Uji Beda terhadap Efisiensi .....	72
5.6 Efektifitas Pemungutan PAD Kabupaten Agam .....	74
5.7 Uji Beda terhadap Efektifitas .....	76
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
6.1 Kesimpulan.....	78
6.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiii</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kriteria Kinerja Keuangan Kategori Elastisitas .....	40
Tabel 3.2. Kriteria Kinerja Keuangan Kategori Efisiensi.....	41
Tabel 3.3. Kriteria Kinerja Keuangan Kategori Efektifitas .....	42
Tabel 4.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Agam .....	47
Tabel 4.2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Agam .....	48
Tabel 4.3. Total PDRB Kabupaten Agam ADHK Tahun 2000 .....	51
Tabel 4.4. Perkembangan PAD Kab. Agam Sebelum Otoda (1993-2000) .....	52
Tabel 4.5. Perkembangan PAD Kab. Agam Setelah Otoda (2001-2009).....	53
Tabel 5.1. Perkembangan IKBR Kab.Agam Sebelum Otoda (1993-2000).....	56
Tabel 5.2. Perkembangan IKBR Kab.Agam Setelah Otoda (2001-2009).....	57
Tabel 5.3. Perkembangan IKBP Kab.Agam Sebelum Otoda (1993-2000) .....	61
Tabel 5.4. Perkembangan IKBP Kab.Agam Setelah Otoda (2001-2009) .....	62
Tabel 5.5. Elastisitas PAD Kab.Agam Sebelum Otoda (1993-2000).....	66
Tabel 5.6. Elastisitas PAD Kab.Agam Setelah Otoda (2001-2009) .....	67
Tabel 5.7. Efisiensi PAD Kab.Agam Sebelum Otoda (1993-2000) .....	70
Tabel 5.8. Efisiensi PAD Kab.Agam Setelah Otoda (2001-2009) .....	71
Tabel 5.9. Efektifitas PAD Kab.Agam Sebelum Otoda (1993-2000) .....	74
Tabel 5.10. Efektifitas PAD Kab.Agam Setelah Otoda (2001-2009).....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. IKBR Kabupaten Agam Sebelum-Setelah Otoda TA. 1993-2009.....	xvi
Lampiran 2. IKBR Kabupaten Agam Sebelum-Setelah Otoda TA. 1993-2009 .....	xvi
Lampiran 3. Elastisitas PAD Kab.Agam Sebelum-Setelah Otoda TA. 1993-2009.....	xvii
Lampiran 4. Efisiensi PAD Kab.Agam Sebelum-Setelah Otoda TA. 1993-2009:.....	xvii
Lampiran 5. Efektifitas PAD Kab.Agam Sebelum-Setelah Otoda TA. 1993-2009 ....	xviii
Lampiran 6. PDRB Kab.Agam Tahun 1993 – 2009 ADHK Tahun 2000 .....	xix
Lampiran 7. Hasil Pengujian Uji Beda ( UjiT-Paired).....	xx



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. (Pramono, 2003)

Kewenangan yang begitu luas akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. (Santoso, 1995)

Apabila diamati lebih jauh, maka dapat dilihat di mana sebenarnya letak kecilnya nilai PAD suatu daerah. Untuk mengetahui hal ini perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok PAD. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari :

- 1). Hasil pajak daerah;
- 2). Hasil retribusi daerah;
- 3). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya;
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya.

Inti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai konsep otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal nasional.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Provinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih sangat rendah.

Dalam kaitannya dengan PAD harus pula diusahakan peningkatan pendapatan domestik regional bruto (PDRB), sehingga diharapkan akan berdampak positif terhadap PAD atau sebaliknya dengan peningkatan PAD diharapkan berdampak positif terhadap pendapatan domestik regional bruto



(PDRB). Dengan demikian diperlukan untuk melihat/mengkaji efisiensi dan efektivitas PAD itu sendiri.

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Barat. Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Agam diberikan keleluasaan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya termasuk keuangan dan penggalian sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan daerahnya, yang diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah. Pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama kurun waktu tahun anggaran 2005-2009 total penerimaan PAD pemerintah Kabupaten Agam berada pada urutan keenam jika dibandingkan dengan sebelas kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 55.820.462.000. Data tersebut juga menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Agam dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan kabupaten lainnya menggambarkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kabupaten Agam sudah cukup memadai dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya.

Seiring dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah Kabupaten Agam seharusnya lebih mengoptimalkan kinerja PADnya. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana kinerja PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam, yang dituangkan ke dalam judul skripsi **“Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Agam Tahun Anggaran 1993 - 2009 ”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa dukungan dari pihak lain (Pemerintah Pusat dan Provinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diungkapkan diatas , maka beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji dan diungkapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Seberapa besar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Agam dalam membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan sebelum maupun sesudah otonomi daerah selama periode tahun 1993-2009.
2. Bagaimana elastisitas PAD terhadap perubahan APBD Kabupaten Agam sebelum maupun sesudah otonomi daerah selama periode tahun 1993-2009.
3. Berapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Agam sebelum maupun sesudah otonomi daerah selama periode tahun 1993-2009.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Agam dalam belanja rutin dan belanja pembangunan sebelum maupun sesudah otonomi daerah selama periode tahun 1993-2009.
2. Untuk mengukur dan menganalisis tingkat Elastisitas PAD terhadap perubahan APBD Kabupaten Agam sebelum maupun sesudah otonomi daerah selama periode tahun 1993-2009.
3. Mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Agam sebelum maupun sesudah otonomi daerah selama periode tahun 1993-2009.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah serta penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.
2. Bagi Instansi Terkait, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Agam dan instansi terkait dalam menyusun atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.
3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini. Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari: halaman judul, , halaman persetujuan / pengesahan, pernyataan original, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan daftar pustaka. Bagian isi terdiri dari enam bab. Adapun subtansi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada berbagai teori mengenai PAD dan Otonomi Daerah. Setelah itu disusun skema kerangka pemikiran yang berujung pada penyusunan hipotesis dalam penelitian yang merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang terdiri dari: kondisi fisik, perkembangan penduduk dan struktur perekonomian.

### **BAB V: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dengan menggunakan data time series periode 1993-2009 baik pada sebelum atau setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian dan kesimpulan yang dapat diambil dari penemuan empiris. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah PAD dengan kondisi sebelum maupun sesudah adanya otonomi daerah selama tahun anggran 1993-2009.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Konsep Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi menurut Amalia (2007) sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Dimana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya. (Abimayu, 2001)

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada. Disamping itu juga membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2000).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan

daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. (Saragi, 2003)

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah, sementara pemerintah daerah harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang ada, serta sangat diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif, untuk itu diperlukan suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Dengan pendekatan baru antara lain : (Sukardi, 2001)

1. Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan penduduk daerah.
2. Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru

3. Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan.
4. Pengetahuan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Dan pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah pembangunan manusia dengan mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

### **2.1.2. Otonomi Daerah**

#### **2.1.2.1 Konsep dasar**

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian prinsip dasar otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Selain itu otonomi daerah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat (lebih bersifat kerakyatan) dari pada kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam arti bahwa kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah tersebut sebagai

alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.2.2 Otonomi Dalam Konsep Ekonomi**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah membawa implikasi baru bagi perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dampak yang paling dirasakan oleh Pemerintah Daerah adalah diberikannya kewenangan yang begitu luas. Hal inilah yang diartikan sebagai pemberian otonomi kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Pada intinya pemberian otonomi diberikan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kondisi yang berkembang di wilayahnya. Namun demikian implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah dituntut kemandiriannya dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi.

Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan keuangan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama yang berasal dari PAD. Idealnya adalah bahwa PAD dapat menjadi sumber utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu sumber-sumber pendanaan/



penerimaan daerah lainnya, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain PAD yang sah hanya bersifat sebagai pemacu bagi pelaksanaan pembangunan.

### **2.1.3. Keuangan Daerah**

Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari keuangan negara, namun demikian ada perbedaan antara keuangan negara dan keuangan daerah. Menurut Nisjar dan Basri dan Subri (2003) keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Menurut Basri dan Subri (2003) mendefinisikan keuangan negara semua kekayaan yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. Semua hak dan kewajiban itu baru bisa dinilai dengan uang apabila dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa keuangan daerah adalah suatu pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah terhadap fungsi alokasi, khususnya keuangan pusat pada daerah otonom, dimana di dalamnya terdapat keterkaitan yang erat dengan perencanaan pembangunan daerah.

Memperhatikan pemahaman terhadap keuangan daerah diatas maka sebenarnya keuangan daerah mencakup dua komponen penting yaitu fungsi penerimaan dan pengeluaran. Fungsi penerimaan berkaitan erat dengan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk didalamnya adalah bantuan pemerintah pusat. Sementara fungsi pengeluaran berkaitan erat dengan memanfaatkan dana



yang ada untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan perencanaan pembangunan di daerah. Mengingat tugas dan fungsi pemerintah daerah yang secara kualitatif dan kuantitatif terus meningkat, konsekwensinya menuntut dana yang lebih besar untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga perlu diupayakan agar pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang ideal yaitu sumber penerimaan yang mempunyai sifat tetap dan selalu mengalami kenaikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai cerminan pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas dua bagian yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sedangkan pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja pembangunan yang meliputi :

1. Belanja administrasi umum
2. Belanja operasional dan pemeliharaan
3. Angsuran pinjaman
4. Pengeluaran tidak terduga yang meliputi :
  - a. Belanja umum
  - b. Belanja cadangan
5. Belanja publik

- a. Belanja modal
  - b. Belanja penunjang
6. Belanja aparatur
- a. Belanja modal
  - b. Belanja penunjang

Hasil penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah tersebut dipergunakan oleh daerah untuk keperluan pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Jadi sehatnya keuangan daerah akan tercermin dari meningkatnya bagian yang dapat dipergunakan bagi pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah harus tetap mempertimbangkan hal-hal tertentu, pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Tjokroamonoto (1995) adalah :

1. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah harus konsisten dengan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah tersebut. Konsistensi ini akan menjamin proses pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat ditingkatkan manfaat kegiatan usaha tersebut.
2. Lebih baik pengeluaran pembangunan daerah dilakukan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dicerminkan dalam suatu anggaran pembangunan belanja daerah.
3. Pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan atas dasar ongkos dan manfaat.

Konsistensi pembangunan daerah terhadap pembangunan pusat memberi arti bahwa daerah harus menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan pemerintah pusat. Konsistensi ini juga memberi arti bahwa

terdapat hubungan antara keuangan daerah dengan pusat. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah mengharuskan pemerintah pusat memperhatikan kepentingan daerah. Beberapa pendekatan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu :

1. Pendekatan sumber pendapatan

Pendekatan ini berdasarkan dari pemberian sumber-sumber pendapatan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa wewenang memanfaatkan sumber pendapatan atau wewenang menikmati sebagian dari pungutan yang dilakukan oleh atau atas nama pusat.

2. Pendekatan Belanja

Pendekatan ini berdasarkan dari kebutuhan pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan tertentu bagi pemerintah daerah, dan pemerintah pusat akan mencukupi kekurangan dana yang dialami oleh pemerintah daerah.

3. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan yang berdasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola pendapatan sendiri untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba mempertemukan antara sumber-sumber dan target belanja daerahnya. Sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran daerah masih kurang, maka pemerintah pusat akan memberikan bantuan kepada daerah.

Sistem ini diharapkan mampu mendorong Kabupaten/kota untuk mengeksplorasi kemampuan perpajakan (*taxable capacity*) mereka secara lebih

efektif. Tetapi hal ini juga menimbulkan asumsi-asumsi bahwa Kabupaten/Kota tersebut mempunyai kebebasan-kebebasan untuk merubah tarif pajak atau memungut jenis pajak baru. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian, yang nampak lebih esensial adalah bahwa pemerintah pusat perlu mengambil kebijakan yang lebih fleksibel.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki

Tujuan dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan sendiri, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, terutama yang berasal dari PAD. Idealnya adalah bahwa PAD dapat menjadi sumber utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu sumber-sumber pendanaan/penerimaan daerah lainnya, seperti dana perimbangan, dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, hanya bersifat sebagai pemacu bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini sangat diharapkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maka untuk mengetahui peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam maka kita harus tahu berapa kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD, laju pertumbuhan PAD dan sumber-sumber PAD, tingkat kemandirian keuangan

daerah, kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah, dan kinerja administrasi penerimaan PAD dengan menghitung nilai efektifitas dan efisiensi PAD.

#### **2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat diterapkan di kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;



## 6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Davey (1988) terlebih dahulu mengemukakan bahwa pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Dari dua pengertian pajak daerah di atas, terlihat bahwa pada prinsipnya pajak daerah itu mengandung unsur-unsur, yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang. Selain itu juga pajak daerah harus dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha;
3. Retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 1962, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut.

Hasil perusahaan daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai. Sementara itu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

Menurut Widayat (1994) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah :

- 1). Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 2). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;

- 3). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
- 4) Adanya kebocoran-kebocoran;
- 5). Biaya pungut yang masih tinggi;
- 6). Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- 7). Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Jaya (1996) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut :

- 1). Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- 2). Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;
- 3). Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
- 4). Alasan politis dimana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
- 5). Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya "memberikan" kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan di daerahnya.

### 2.1.5. Kemampuan Daerah.

Menurut Saragih (1996) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendati perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.

Rendahnya perolehan pendapatan asli daerah (PAD) menurut Mahi (2000) adalah disebabkan karena :

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 di mana beberapa pajak dan retribusi yang potensial bagi daerah dihilangkan;
2. Peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah disebabkan selama ini Pemerintah Daerah selalu mengharapkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga upaya peningkatan PAD di daerah menjadi relatif rendah;
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah akibatnya biaya pungut pajak dan retribusi menjadi lebih besar dibandingkan realisasi penerimaannya;
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran yang sangat merugikan daerah.



Melihat kenyataan yang ada bahwa PAD yang diperoleh pada umumnya masih relatif rendah, maka tidak sedikit Pemerintah Daerah yang merasa khawatir melaksanakan otonomi daerah. Sebenarnya apabila diberikan kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan, maka Pemerintah Daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Gaffar (2000) bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diharapkan lebih menekankan kepada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin (*follow function*), tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang luas bagi daerah akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama yang berasal dari PAD. Idealnya adalah bahwa PAD dapat menjadi sumber utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu sumber-sumber pendanaan/penerimaan daerah lainnya, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain PAD yang sah hanya bersifat sebagai pemacu bagi pelaksanaan pembangunan.



### 2.1.6. Hubungan antara PAD dengan APBD

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah harus mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Masalah pengeluaran pemerintah dapat digolongkan kedalam tiga pendapat ahli ekonomi :.....  
(Mangkoesebroto, 1992)

#### 1. Model Pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal dari perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah dari total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini investasi swasta sudah semakin besar peranan pemerintah sangat besar pada tahap ini. Dan pada tahap selanjutnya pengeluaran pemerintah beralih sebagai penyedia jasa-jasa sosial.

#### 2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan pendapat bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat.

### 3. Teori Peacock dan Wisman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisa bahwa pemerintah senantiasa akan meningkatkan pengeluaran dan sebaliknya rakyat tidak suka membayar pajak yang terlalu besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah seluruh belanja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan (Sutrisno, 1994). Pendapat senada dikemukakan Sukirno (1994) Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai pengeluaran pemerintah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pengeluaran pemerintah mengacu kepada penerimaan yang diterima (terutama proyeksi dari pajak). Dalam konteks pengeluaran pemerintah daerah saat ini disamping penerimaan dari PAD juga pertimbangan dana alokasi pusat yang proporsinya sangat besar dalam struktur penyusunan APBD. Dalam konteks pembiayaan pembangunan maka besar kecilnya pembiayaan pembangunan sangat tergantung dari kemampuan APBD dalam menyediakan anggaran pembangunan. Semakin besar anggaran pembangunan yang tercermin dari APBD maka akan semakin besar dampak (*multiplier effect*) terhadap perekonomian suatu daerah. Hal ini jelas akan

berdampak terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB.

PAD memegang peranan penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini disebabkan PAD menjadi salah satu instrumen kebijakan alokasi anggaran dan prioritas pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD, Panggar DPR dan pihak eksekutif tetap menempatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Penganggaran daerah termasuk kategori perencanaan jangka pendek (*perencanaan tahunan*) yang merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Penganggaran daerah terdiri atas: formulasi kebijakan anggaran (*budget operational planning*). Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya. Dalam penyusunan anggaran, rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah perlu diperhatikan. Salah satu fungsi anggaran adalah membantu manajemen pemerintah dalam pengambilan keputusan, dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja unit kerja dibawahnya. Kebutuhan pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat kinerja bagi keberadaan program pemerintah baik yang berasal dari kabupaten maupun Provinsi .

Pengeluaran pemerintah daerah terutama anggaran daerah akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan. Disamping itu dapat dikembangkan menjadi ukuran-ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja semua aktifitas unit kerja.

Mandica (2001) mengatakan bahwa dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah sebaiknya memainkan peran dalam penyusunan anggaran sebagai berikut:

1. Menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan penduduknya, bukan berdasarkan perintah penyeragaman kebijakan dari pemerintah nasional;
2. Mengatur keuangan daerah termasuk pengaturan tingkat dan level pajak dan pengeluaran yang memenuhi standar kebutuhan publik dan wilayahnya;
3. Menyediakan pelayanan dan service pajak sebagaimana yang diinginkan oleh publik sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing
4. Mempertimbangkan dengan seksama keuntungan sosial dari setiap program dan rencana pembangunan dan berdampak luas terhadap roda pembangunan dan bukan hanya kepentingan konstituen tertentu.
5. Menggunakan daya dan segenap kekuatan secara independen dalam mewujudkan dan menstimulasi perencanaan dan konsep pembangunan ekonomi;
6. Memfokuskan agenda dan penetapan program ekonomi dalam anggaran yang mendukung kestabilan pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja di daerah;
7. Menentukan batas kenormalan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah;



8. Mencari dan menciptakan peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat.

Mardiasmo (2002), mengatakan bahwa pemerintah daerah haruslah mengelola keuangannya dengan penuh tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan pembangunan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Komprehensif dan disiplin

anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan, khususnya di tingkat daerah.

Karenanya, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang efektif dan diagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimiliki daerah, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

2. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberikan keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang serta potensi yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati dan sesuai dengan karakteristik daerah, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.



### 3. Terprediksi

kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang kurang jelas misalnya, program pembangunan yang dibiayai anggaran daerah yang tidak tepat sasaran maka daerah akan menghadapi ketidakpuasan (*uncertainty*) yang sangat besar dari berbagai kalangan, hingga prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan.

### 4. Kejujuran

kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang tidak memunculkan kejujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektifitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.

### 5. Informasi

Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik dan objektif. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, *output*, dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting dipublikasikan

### 6. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi masyarakat bahwa perumusan kebijakan memiliki kemampuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan

dijalankan. Selanjutnya, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik pada semua tingkatan.

APBD pada dasarnya membuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk menyelenggarakan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari rencana alokasi biaya ataupun input yang ditetapkan. Mekanisme penyusunan anggaran daerah yang berdasarkan anggaran kinerja terdiri dari serangkaian tahap aktifitas sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyiapan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun dan menyepakati arah dan kebijakan umum APBD yang berpedoman pada rencana strategis daerah (renstrada) atau dokumen perencanaan lainnya, penjaringan aspirasi masyarakat, laporan kinerja tahun

sebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD serta pokok-pokok kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

2. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD yang dilaksanakan bulan juli agustus;
3. Kepala daerah menerbitkan surat edaran (SE) dan disampaikan kepada setiap unit kerja untuk dasar penyusunan rancangan anggaran unit kerja. Proses tersebut dilaksanakan pada bulan agustus-September;
4. Penyusunan rancangan anggaran unit kerja yang dituangkan dalam pernyataan anggaran, pengajuan pernyataan anggaran kepada tim anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislatif dilaksanakan pada bulan Oktober-November;
5. Pengajuan rancangan APBD kepada DPRD pembahasan rancangan APBD antara tim anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislatif dilaksanakan pada bulan Oktober-November;
6. Penyiapan rancangan APBD pada sidang paripurna DPRD dan penetapan rancangan APBD menjadi APBD dilaksanakan pada bulan Desember

Strategi dan prioritas APBD disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, pemerintah daerah melalui tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan prioritas APBD. Tim anggaran eksekutif terdiri dari sekretaris daerah sebagai ketua, dan anggotanya yang merupakan unsur perangkat daerah sesuai kebutuhan daerah.
2. Tim anggaran eksekutif dalam penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat menggunakan berbagai sumber data dan metode penyusunan yang

memfokuskan pada identifikasi kondisi yang ada untuk mencapai target pelayanan kinerja yang diharapkan.

3. Tim anggaran eksekutif dapat melibatkan tim ahli, yang terdiri dari berbagai instansi maupun akademisi untuk mengembangkan strategi dan prioritas APBD.
4. Strategi dan prioritas APBD yang telah disusun oleh tim anggaran eksekutif, selanjutnya disampaikan kepada panitia anggaran legislatif untuk dilakukan konfirmasi apakah rumusan strategi dan prioritas APBD telah disesuaikan dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebelumnya.
5. Strategi dan prioritas APBD selanjutnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. (Kepmendagri no. 29 tahun 2002).

#### **2.1.7 Elastisitas PAD**

Elastisitas merupakan respon atau kepekaan suatu variable apabila variable lainnya mengalami perubahan. Secara teoritis perubahan APBD yang tercermin dari perubahan total pendapatan akan direspon secara positif oleh perubahan PAD. Hal ini disebabkan APBD merupakan instrumen fiskal yang positif dalam mendorong kegiatan pembangunan di daerah. Melalui peningkatan kegiatan pembangunan di daerah maka diharapkan potensi pendapatan masyarakat akan meningkat dan mendorong pula peningkatan kemampuan masyarakat di dalam membayar berbagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah



### **2.1.8 Efektifitas PAD**

Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan target atau perbandingan antara realisasi dengan potensi sumber penerimaan daerah misalnya pajak daerah dan retribusi daerah. Namun yang sering digunakan sebagai pembagiannya adalah target, sehingga tergambar selalu over target seharusnya pembagiannya adalah menggunakan potensi sehingga lebih realistis. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) akan menunjukkan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang telah ditargetkan. Kemampuan untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100 %. Akan tetapi, untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi apabila ternyata biaya untuk mencapai target sangat besar, maka berarti pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut tidak efektif.

### **2.1.9 Efisiensi PAD**

Efisiensi dapat didefinisikan rasio antara input dengan output yang nilainya antara 0 % sampai dengan 100 % . Dalam kaitannya dengan anggaran dapat juga menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan. Oleh karena itu perlu dihitung juga rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD dan



dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 % artinya, semakin kecil maka akan semakin efisien.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Lains (1995) dalam penelitiannya yang berjudul kemampuan keuangan daerah di Sumatera Barat sebagai contoh kasus menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat kecil atau dengan kata lain sebagian besar pembiayaan dasar dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Kecilnya proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah disebabkan antara lain karena jenis-jenis pajak yang menjadi hak daerah kurang potensial. Lains menyarankan perlu adanya desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan serta sistem pajak dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.

Hasibuan (1991) membahas keuangan daerah, antara lain melihat peranan PAD dengan penerimaan rutin. Sekitar 159 Kabupaten/Kota peranan PAD nya adalah 25 % dari penerimaan rutin, sebanyak 47 Kabupaten/Kota peranan PAD nya kurang dari 10 %. Lebih lanjut Devas et.al (1989) yang meneliti tentang keuangan pemerintah daerah di Indonesia , mengemukakan bahwa dalam garis besarnya penerimaan daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya mampu menutup 1/5 dari pengeluaran daerah.

Bachtiar (1992) meneliti tentang otonomi dan implikasinya terhadap kemampuan keuangan daerah, dan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat PAD adalah PDRB, jumlah penduduk, struktur ekonomi, tingkat perkembangan peraturan perundang-undangan terkait. Beliau menyarankan perlu terus dikembangkan peraturan perundangan mengenai

pajak dan retribusi daerah agar pelaksanaan dan penggalian sumber dana pengembangan dapat dilakukan secara optimal.

Yulianto (2001) meneliti tentang peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Kota Yogyakarta. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Berdasarkan ketentuan yang disusun Depdagri – Fisipol UGM, maka Derajat Otonomi Fiskal Kota Yogyakarta yang menggambarkan kemampuan daerah tersebut berada pada kategori “cukup”. Artinya adalah bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom.

Satrio (2010) meneliti tentang peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Kota Jambi. Pada penelitian ini peranan PAD tersebut dibahas secara satu persatu yaitu IKBR, IKBP, Elastisitas, Efisiensi dan Efektifitas PADnya. Selama periode 2000-2008, secara umum dengan menggunakan berbagai data nilai Derajat Otonomi Fiskal Kota Jambi sangat kecil. Artinya kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerah masih rendah dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

### **2.3. Kerangka pemikiran**

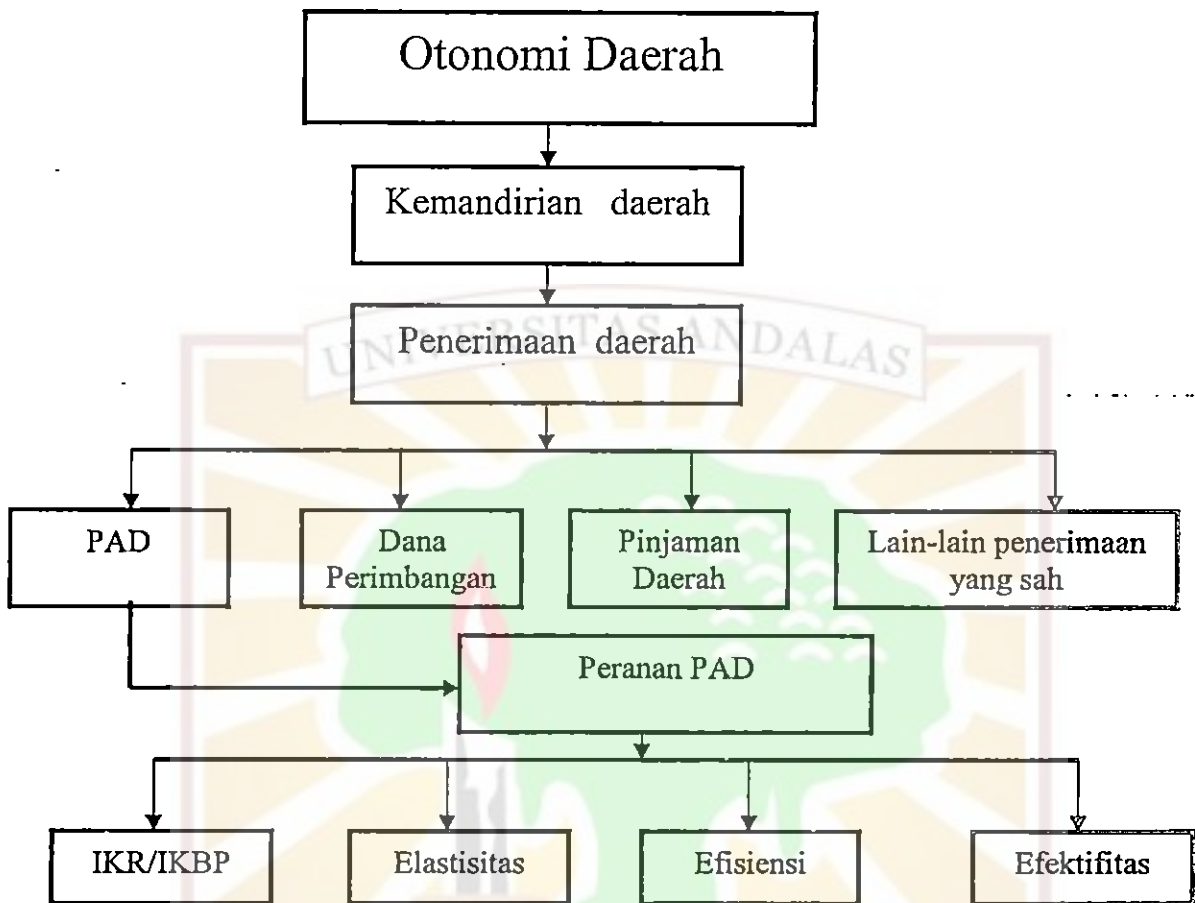
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan

kesempatan yang sebesar-besarnya bagi daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin, untuk mengurangi ketergantungan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Dimana salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah.

Pengalaman penyelenggaraan negara dimasa yang lalu menunjukkan bahwa sistem sentralisasi telah membuat daerah-daerah otonom mempunyai ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan. Kondisi ini telah menghilangkan inisiatif dari daerah-daerah otonom untuk berusaha mencari sendiri dana pembiayaan pembangunan. Namun hal itu telah berlalu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana didalamnya terkandung semangat bahwa daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Termasuk dalam hal pencarian sumber dana pembangunan.

Terjadinya perubahan paradigma dari sistem yang sentralistik menuju sistem yang desentralisasi, maka diharapkan akan terjadi kemandirian dari daerah otonom untuk membangun daerahnya sendiri dengan berlandaskan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Secara skematis kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran

#### 2.4. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, studi sebelumnya dan kerangka pemikiran maka dapat disusun suatu hipotesis, yang terdiri dari :

1. Diduga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan sesudah pelaksanaan otonomi daerah mengalami peningkatan.
2. Di duga Elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB Kabupaten Agam bersifat elastis;
3. Di duga tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Agam berada dalam keadaan efisien dan efektif

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder selama periode 1993 – 2009. Pengumpulan data sekunder dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi instansi-instansi yang terkait. Sehingga diperoleh publikasi data dan laporan yang dibutuhkan dalam pengembangan pola pikir dan kesempurnaan penelitian.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan adalah :

1. APBD Kabupaten Agam yang terdiri dari data penerimaan daerah (yang berupa data pendapatan asli daerah / PAD) dan data pengeluaran daerah (yang terdiri dari data belanja rutin dan data belanja pembangunan).
2. PDRB Kabupaten Agam berdasarkan harga konstan tahun 2000

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. DPKAD Kabupaten Agam
2. BPS Kabupaten Agam
3. Bappeda Kabupaten Agam



### 3.3. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Analisis Deskriptif Kualitatif* Merupakan analisis yang dilakukan dengan cara melakukan deskripsi terhadap data yang ada dari tahun ke tahun untuk kemudian menarik kesimpulan.
- b. *Analisis Deskriptif Kuantitatif* Merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara menggunakan alat analisis kuantitatif.

### 3.4. IKBR dan IKBP Kabupaten Agam

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu untuk mengetahui Berapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja aparatur dan belanja pelayanan publik Kabupaten Agam maka digunakan pendekatan Indeks Kemampuan Belanja Rutin (IKBR) dan Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan (IKBP) yang di ukur dalam persentase dengan formulasi :  
(Djoyosubroto, 1991 : 17)

$$IKBR = \frac{\sum PAD}{\sum \text{Belanja rutin}} \times 100\% \text{ -----(1)}$$

$$IKBP = \frac{\sum PAD}{\sum \text{Belanja Pembangunan}} \times 100\% \text{ -----(2)}$$

Dimana :

IKBR /IKBP 0 – 30 berada pada kategori rendah

IKBR /IKBP 31 – 50 berada pada kategori Sedang

IKBR /IKBP 50 > berada pada kategori Tinggi

### 3.5. Elastisitas PAD terhadap Perubahan APBD di Kabupaten Agam

Elastisitas PAD terhadap perubahan APBD adalah reaksi atau respon perubahan PAD sebagai akibat perubahan APBD. APBD yang dimaksudkan disini adalah total penerimaan daerah. Nilai elastisitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

**Tabel.3.1**  
**Kriteria Kinerja Keuangan**  
**Kategori Elastisitas**

No	Kategori	Prosentase (%)
1	Elastis	$N > 1$
2	In-elastis	$N < 1$
3	Unitary	$N = 1$
4	In-elastis Sempurna	$N = 0$
5	Elastis Sempurna	$N = \infty$

*Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994*

Jadi, untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui tingkat elastisitas PAD terhadap perubahan APBD maka digunakan formula sebagai berikut : (Mardiasmo, 2002)

$$e = \frac{\text{Prosentase } \Delta \text{PAD}}{\text{Prosentase } \Delta \text{APBD}} \times 100 \% \quad \text{-----} \quad (3)$$

Dimana      APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

              PAD : Pendapatan Asli Daerah

              e     : Koefisien Elastisitas

### 3.6. Efisiensi PAD Kabupaten Agam

Efisiensi dapat didefinisikan rasio antara input dengan output yang nilainya antara 0 % sampai dengan 100 %. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan kriteria penilaian berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

**Tabel.3.2**  
**Kriteria Kinerja Keuangan**  
**Kategori Efisiensi**

No	Kategori	Prosentase (%)
1	Sangat efisien	0 % - 20 %
2	Efisien	21 % - 40 %
3	Cukup efisien	41 % - 60 %
4	Kurang efisien	61 % - 80 %
5	Tidak efisien	> 80 %

*Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994*

Untuk menjawab tujuan penelitian ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat tingkat efisiensi (Efi) maka digunakan formula sebagai berikut : (Mardiasmo, 2002)

$$Efi = \frac{\text{Biaya Pungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \% \dots \dots \dots (5)$$

### 3.7. Efektifitas PAD Kabupaten Agam

Selain itu, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

**Tabel.3.3**  
**Kriteria Kinerja Keuangan**  
**Kategori Efektifitas**

No	Kategori	Prosentase (%)
1	Sangat efektif	> 100 %
2	Efektif	90 % - 100 %
3	Cukup efektif	80 % - 90 %
4	Kurang efektif	60 % - 80 %
5	Tidak efektif	< 60 %

*Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994*

Untuk menjawab tujuan penelitian ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat tingkat efektivitas (Eve) maka digunakan formula sebagai berikut : (Mardiasmo, 2002)

$$Eve = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \% \dots\dots\dots(4)$$

**3.8 Uji Compare Mean ( Uji Beda T- Paired )**

Uji t-paired digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas. Dua sampel yang dimaksud di sini adalah sampel yang sama namun mengalami proses pengukuran maupun perlakuan yang berbeda. Uji ini dirumuskan sebagai berikut :

$$t_{(\text{hitung})} = \frac{g}{sd/\sqrt{n}} \dots\dots\dots(6)$$

Output tersebut dapat dilihat dari nilai  $t$  dan Sig. (2-tailed) nya. Kesimpulan dapat diambil melalui penerimaan dan penolakan hipotesis yang diusulkan. Jika sebagai acuan adalah  $H_0$  (nol) maka :

1.  $H_0$  diterima jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , atau nilai  $p\text{-value}$  pada kolom sig. (2-tailed)  $>$  level of significant ( $\alpha$ ).
2.  $H_0$  ditolak jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , atau nilai  $p\text{-value}$  pada kolom sig. (2-tailed)  $<$  level of significant ( $\alpha$ ).

Jika  $H_a$  dijadikan acuan sebagai penerimaan atau penolakan hipotesis, maka :

1.  $H_a$  diterima jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , atau nilai  $p\text{-value}$  pada kolom sig. (2-tailed)  $<$  level of significant ( $\alpha$ ).
2.  $H_a$  ditolak jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , atau nilai  $p\text{-value}$  pada kolom sig. (2-tailed)  $>$  level of significant ( $\alpha$ ).

Kriteria pengambilan keputusan :

$H_0 : \beta_i = 0$      $H_0$  diterima ( $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ) artinya variabel independent secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_i \neq 0$      $H_a$  diterima ( $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ) artinya variabel independent secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.



### 3.9. Operasional variabel

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diamati.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, yang diukur dalam satuan Rupiah Pertahun
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain, yang diukur dalam satuan Rupiah pertahun.
3. Penerimaan Daerah adalah jumlah keseluruhan penerimaan daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, PAD, Bagi Hasil Pajak-Bukan Pajak, Sumbangan & Bantuan, yang diukur dalam satuan Rupiah Pertahun
4. Pengeluaran Rutin Daerah adalah jumlah keseluruhan pengeluaran rutin daerah di luar belanja pegawai, yang diukur dalam satuan Rupiah pertahun.
5. Belanja rutin merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk belanja pegawai, belanja barang modal dan perjalanan dinas. Belanja rutin hanya ditujukan untuk kegiatan operasional dalam menjalankan pemerintahan.
6. Belanja pembangunan adalah belanja yang dialokasikan pemerintah yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur publik, program dan kegiatan produktif lainnya. Belanja pembangunan sangat penting guna mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN AGAM

#### 4.1 Kondisi Fisik

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis wilayah kabupaten Agam terletak antara  $00^{\circ}01'34''$  -  $00^{\circ}28'43''$  Lintang Selatan,  $99^{\circ} 52''$  -  $100^{\circ} 23''$  Bujur Timur. Kabupaten Agam memiliki wilayah seluas  $2.232,30 \text{ km}^2$  yang hanya sekitar 5,29 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat yang mencapai  $42.229,04 \text{ km}^2$ , dan penduduk di Kabupaten Agam berjumlah sekitar 500.000 jiwa.

Kabupaten Agam memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten di Sumatera Barat yaitu Di bagian Utara Kabupaten agam berbatasan dengan Kabupaten Pásaman, dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan kabupaten Tanah Datar. Dan bagian Barat Kabupaten Agam berbatasan dengan Samudera Hindia, serta bagian Timur berbatasan dengan kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Agam mempunyai posisi yang strategis karena dilewati oleh jalur arteri primer yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Medan, maupun Kota Pekanbaru.

Dilihat dari sudut topografi, daerah Kabupaten Agam terdiri dari wilayah datar dengan kemiringan antara  $0^{\circ}$  -  $3^{\circ}$  dengan luas  $662 \text{ Km}^2$ , wilayah datar berombak dengan kemiringan antara  $3^{\circ}$  -  $8^{\circ}$  dengan luas  $153 \text{ Km}^2$ , wilayah datar berombak dan

bergelombang dengan kemiringan antara 8° - 15° dengan luas 801 km<sup>2</sup> serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lebih dari 15° dengan luas 153 km<sup>2</sup>.

Di Kabupaten Agam terdapat 2 buah gunung, yaitu Gunung Marapi di kecamatan Banuhampu dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang di kecamatan IV Koto dengan ketinggian 2.877 meter. Pada kabupaten ini terdapat sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Maninjau yang memiliki luas 9.950 ha dan terletak di wilayah pegunungan yang terbentuk dari 2 jalur utama, yaitu Basin Batang Agam di bagian utara dan Batang Antokan di bagian selatan.

Iklm Kabupaten Agam sangat dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim Barat dan musim Timur. Musim Barat angin bertiup dari ke arah Barat yang umumnya terjadi pada bulan April sampai Oktober dan musim Timur angin bertiup ke Selatan dan Timur yang umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai April. Musim kemarau terjadi kira-kira bulan Mei sampai pada bulan Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan oktober sampai bulan April. Iklm rata di kawasan ini adalah minimum 25°C, dengan kelembaman udara rata-rata 88 %, serta kecepatan angin minimum 4 km/jam dan maksimum 20 km/jam.

Secara administratif, Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan yang terbagi dalam 82 Nagari serta 467 jorong. kecamatan dengan wilayah terluas adalah Palembayan yaitu 349,81 km<sup>2</sup>, disusul kemudian kecamatan Lubuk Basung dan kecamatan Ampek Angkek dengan luas wilayah masing-masing 278,40 km<sup>2</sup> dan 278,69 km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Banuhampu dengan luas

28,45 km<sup>2</sup>. Pusat Kegiatan Pemerintahan kabupaten Agam terletak di Kecamatan Lubuk Basung.

**Tabel 4.1 Luas Kecamatan dan jumlah Kelurahan di Kabupaten Agam**

Kecamatan	Nagari	Luas (km <sup>2</sup> )
1. Tanjung Mutiara	3	205,73
2. Lubuk Basung	5	278,40
3. Ampek Nagari	4	268,69
4. Tanjung Raya	9	244,03
5. Matur	6	93,69
6. IV Koto	7	68,72
7. Malalak	4	104,49
8. Banuhampu	7	28,45
9. Sungai Pua	5	44,29
10. Ampek Angkek	7	30,66
11. Canduang	3	52,29
12. Baso	6	70,30
13. Tilatang Kamang	3	56,07
14. Kamang Magek	3	99,60
15. Palembayan	6	349,81
16. Palupuh	4	237,08
<b>JUMLAH</b>	<b>82</b>	<b>2.232,30</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kab. Agam*

#### 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk

Secara teoritis, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh T. R. Malthus bahwa jumlah penduduk selalu meningkat jumlahnya menurut deret hitung sedangkan alat pemuas kebutuhan penduduk berupa barang dan jasa selalu

meningkat menurut deret ukur. Keadaan yang sama juga terjadi pada penduduk kabupaten Agam yang juga meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 4.2.**  
**Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Agam**  
**Tahun 2000-2009 (jiwa)**

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2000	417.324	-
2001	418.837	0,36
2002	422.231	0,90
2003	428.556	1,50
2004	431.603	0,71
2005	435.276	0,85
2006	439.611	0,99
2007	443.857	0,96
2008	445.387	0,34
2009	451.264	1,31
Rata-rata Pertumbuhan		0,88

*Sumber : BPS Kabupaten Agam*

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Agam berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Agam sebesar 417.324. Selanjutnya selama periode penelitian 2000-2009 persentase rata-rata peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Agam sebesar 0,88 persen. Pada tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Agam sebesar 418.837 jiwa atau meningkat sebesar 0,36 persen bila dibandingkan dengan tahun 2000. Dan pada tahun 2003 terjadi kenaikan persentase peningkatan jumlah penduduk yang cukup berarti yaitu dari peningkatan 1,50 persen. sementara pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Agam kembali mengalami penurunan menjadi 0,85 persen, sedangkan pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Agam adalah sebanyak 439.611 jiwa,



kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen pada tahun 2007 menjadi 443.857 jiwa dan pada tahun 2008 jumlah penduduk di Kabupaten Agam adalah sebanyak 445.387 jiwa atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,34 persen. Namun pada tahun 2009 pertumbuhan penduduk kabupaten agam meningkat kembali menjadi 451.264 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,31 persen.

#### **4.3 Struktur Perekonomian**

Hasil pembangunan yang telah dicapai dan perencanaan yang akan dibuat membutuhkan bermacam-macam data / parameter Statistik, yang berguna untuk mengevaluasi kebijaksanaan pembangunan sektoral di masa lalu dan melihat hasilnya. Berbagai data/ parameter statistik mutlak di perlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Salah satu data/ parameter statistik yang dibutuhkan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha. Melalui data tersebut diperoleh gambaran skala prioritas pembangunan daerah atau regional, serta kemajuan sektornya. Tingkat Pertumbuhan riil PDRB dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. ...

Indikator-indikator tersebut merupakan bahan acuan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang telah dan akan dilakukan.

Hasil penghitungan PDRB Lapangan Usaha diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah secara utuh. Meskipun PDRB memiliki kelemahan karena mengabaikan faktor dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan ekonomi. Biaya kerusakan lingkungan tersebut dianggap nol. Oleh karenanya, perlu dikembangkan PDRB dengan memperhitungkan dampak lingkungan. Atau lebih dikenal dengan PDRB *Green*.

Hingga saat ini pendapatan nasional dan daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan suatu wilayah. Dalam kerangka ini maka perkembangan PDRB yang tercermin dari laju pertumbuhan perekonomian secara sektoral harus tumbuh secara kokoh terutama berkaitan dengan potensi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan kepada potensi daerah akan memberikan nilai tambah yang lebih besar, sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki daya saing.

Indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur Pembangunan Ekonomi dan pertumbuhannya adalah besaran dan Perkembangan Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Selama kurun waktu 1993-2009 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Agam mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi cukup moderat. Indikator tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi krisis ekonomi nasional, tapi perekonomian Kabupaten Agam masih mampu bertahan dan bahkan berkembang. PDRB Kabupaten Agam dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Total PDRB Kabupaten Agam**  
**Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**  
**Tahun Anggaran 1993 – 2009**

Tahun	PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp)
1993	1.384.844,79
1994	1.481.756,91
1995	1.590.051,79
1996	1.708.366,25
1997	1.776.217,83
1998	1.709.095,82
1999	1.744.952,40
2000	1.800.687,86
2001	1.873.790,14
2002	1.962.785,52
2003	2.066.647,63
2004	2.190.815,65
2005	2.325.161,69
2006	2.468.761,80
2007	2.626.066,59
2008	2.792.887,28
2009	2.929.871,68

*Sumber : BPS Kab. Agam. Data Diolah*

Berdasarkan 4.3 tersebut, terlihat bahwa PDRB harga konstan Kabupaten Agam mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya. Selama periode tahun anggaran 1993 – 1996, angka nominal untuk PDRB Kabupaten agam selalu mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 1998 angka PDRB nya mengalami penurunan di karenakan terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Negara Indonesia yang juga berdampak pada perekonomian di Kabupaten Agam. Selanjutnya, pada

periode tahun 1999 – 2009 angka PDRB Kabupaten Agam kembali mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahunnya.

#### 4.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari penerimaan yang berasal dari potensi daerah. Semakin besar penerimaan PAD dalam struktur penerimaan daerah, maka akan semakin penting peranan PAD dalam membiayai pembangunan daerah.

**Tabel 4.4.**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Agam Sebelum Otonomi**  
**Tahun 1993-2000**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)
1993	914.905.000	857.893.000	-
1994	1.574.666.000	1.325.442.000	54,49
1995	2.042.823.000	1.578.153.000	19,06
1996	1.921.795.000	1.501.314.000	-4,86
1997	1.817.213.000	1.485.740.000	-1,03
1998	1.504.628.000	1.326.463.000	-10,72
1999	1.867.432.000	1.967.151.000	48,30
2000	2.100.769.000	2.444.396.000	24,26
Rata-rata			18,5

Sumber : BPS Kab. Agam. Data Diolah

Dari tabel 4.4 tersebut terlihat bahwa dari tahun 1993 – 2000 atau sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah, secara umum rata-rata pertumbuhan PAD di Kabupaten Agam adalah sebesar 18,5 persen. Pertumbuhan penerimaan PAD

tertinggi di Kabupaten Agam terjadi pada tahun 1994 yaitu sebesar 54,49 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, pertumbuhan penerimaan PAD terendah terjadi pada tahun 1998 yakni sebesar -10,72 persen yang merupakan akibat krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia yang juga berdampak pada perekonomian Kabupaten Agam.

**Tabel 4.5.**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Agam Setelah Otoda**  
**Tahun 2001-2009**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan Penerimaan PAD (%)
2001	3.473.286.000	3.563.438.000	45,77
2002	4.110.235.000	4.593.656.000	28,91
2003	10.270.120.000	11.718.358.000	155,09
2004	10.309.196.000	11.316.909.000	-3,42
2005	11.200.886.000	11.545.693.000	2,02
2006	15.997.784.000	17.292.121.000	49,77
2007	20.819.860.000	22.230.477.000	28,55
2008	23.370.585.000	24.180.990.000	8,77
2009	24.509.742.000	25.956.303.000	7,34
Rata-rata			35,87

*Sumber : BPS Kab. Agam. Data Diolah*

Dari tabel 4.5 tersebut terlihat bahwa dari tahun 2000 - 2009 atau setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah, secara umum rata-rata pertumbuhan PAD di Kabupaten Agam adalah sebesar 35,87 persen. Pertumbuhan penerimaan PAD tertinggi di Kabupaten Agam terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 155,49 persen dari tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan PAD tahun 2003 tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi



Daerah, dimana di dalamnya diatur berbagai jenis retribusi dan pajak daerah yang baru sebagai sumber penerimaan daerah. Sedangkan, pertumbuhan penerimaan PAD terendah terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar -3,42 persen yang merupakan akibat dari berkurang penerimaan PAD Kabupaten Agam. Apabila diperhatikan lebih jauh ternyata laju pertumbuhan PAD di Kabupaten Agam menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun trend yang ditunjukkannya adalah positif. Secara keseluruhan selama periode 1993-2009 penerimaan PAD Kabupaten Agam mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,27 persen. Apabila kedua rata-rata pertumbuhan PAD tersebut dibandingkan maka pertumbuhan penerimaan PAD setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah memang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan penerimaannya, sebesar 18,5 persen sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sebesar 35,87 persen setelah pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan persentase rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Agam.

Tabel 4.4. juga memberikan informasi mengenai realisasi pencapaian target penerimaan PAD. Secara keseluruhan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Agam melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 1996-1998 tidak tercapai. Rendahnya pencapaian target pada tahun ini tidak terlepas belum optimalnya pengelolaan PAD, terlebih belum adanya pemberlakuan secara efektif Undang-undang Nomor 22 dan 23 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Agam

Salah satu indikator untuk mengetahui kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanjanya, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Semakin tinggi proporsi PAD dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan maka daerah tersebut akan semakin mandiri. Kemampuan keuangan daerah dapat dicerminkan dari indeks kemampuan rutin maupun indeks kemampuan pembangunan.

##### 5.1.1 Indeks Kemampuan Belanja Rutin (IKBR)

Indeks kemampuan belanja rutin adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah. Semakin besar proporsi PAD dalam membiayai belanja rutin daerah, maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya semakin kecil proporsi PAD dalam membiayai belanja rutin maka semakin besar ketergantungan Kabupaten Agam terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran rutin. Secara umum Kabupaten Agam masih tetap memiliki ketergantungan yang besar terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan Provinsi.

Secara keseluruhan selama periode 1993-2009 rata-rata indeks belanja rutin pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar 5,47 persen (Lampiran 1). Ini berarti selama periode 1993-2009 belanja rutin di Kabupaten Agam mampu dibiayai

sendiri sebesar 5,47 persen, namun angka ini masih berada pada kategori yang masih rendah. Adapun perkembangan koefisien Indeks kemampuan belanja rutin di Kabupaten Agam sebelum dan sesudah otonomi daerah tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Perkembangan Indeks Kemampuan Belanja Rutin Pemerintah**  
**Kabupaten Agam Sebelum Otonomi Daerah**  
**Periode Tahun 1993 - 2000**

Tahun	Komponen Pengukuran Indeks Kemampuan Belanja Rutin		Indeks Kemampuan Belanja Rutin	Keterangan
	PAD Kab. Agam (Rp)	Belanja Rutin (Rp)	IKBR (%)	
1993	857.893.000	18.818.037.000	4,55	Rendah
1994	1.325.442.000	20.360.931.000	6,50	Rendah
1995	1.578.153.000	23.144.112.000	6,81	Rendah
1996	1.501.314.000	25.767.341.000	5,82	Rendah
1997	1.485.740.000	28.361.887.000	5,23	Rendah
1998	1.326.463.000	35.705.098.000	3,71	Rendah
1999	1.967.151.000	54.668.053.000	3,59	Rendah
2000	2.444.396.000	42.110.048.000	5,80	Rendah
<b>Rata-rata</b>			<b>5,25</b>	<b>Rendah</b>

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 5.1 di atas tergambar bahwa selama periode 1993-2000 atau sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah Indeks kemampuan belanja rutin pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), meskipun demikian secara umum rata-rata IKBR Kabupaten Agam masih rendah, yaitu sebesar 5,25. Nilai IKBR tertinggi Kabupaten Agam sebelum otonomi daerah terjadi pada tahun 1995, yaitu mencapai 6,81 persen. Hal ini berarti sebesar 6,81 persen belanja rutin pemerintah

Kabupaten Agam mampu dibiayai oleh PAD Kabupaten Agam. Sedangkan, IKBR Kabupaten Agam terendah terjadi pada tahun 1999, yaitu sebesar 3,59 persen. Rendahnya IKBR pada tahun ini dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang cenderung mengalami penurunan akibat terjadinya krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Dimana perekonomian baik itu terhadap negara maupun daerah mengalami stagnasi. Dengan buruknya perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 1998, secara tidak langsung juga terefleksi pada perkembangan ekonomi Kabupaten Agam.

**Tabel 5.2.**  
**Perkembangan Indeks Kemampuan Belanja Rutin Pemerintah**  
**Kabupaten Agam Setelah Otonomi Daerah**  
**Periode Tahun 2000 – 2009**

Tahun	Komponen Pengukuran Indeks Kemampuan Belanja Rutin		Indeks Kemampuan Belanja Rutin	Keterangan
	PAD Kab. Agam (Rp)	Belanja Rutin (Rp)	IKBR (%)	
2001	3.563.438.000	124.971.869.000	2,85	Rendah
2002	4.593.656.000	164.658.143.000	2,78	Rendah
2003	11.718.358.000	195.129.796.000	6,00	Rendah
2004	11.316.909.000	208.511.773.000	5,42	Rendah
2005	11.545.693.000	211.769.351.000	5,45	Rendah
2006	17.292.121.000	217.433.488.000	7,95	Rendah
2007	22.230.477.000	277.848.369.000	8,00	Rendah
2008	24.180.990.000	386.538.609.000	6,25	Rendah
2009	25.956.303.000	417.693.250.000	6,21	Rendah
<b>Rata-rata</b>			<b>5,66</b>	<b>Rendah</b>

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 5.2 di atas tergambar bahwa selama periode 2001-2009 atau setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah Indeks kemampuan belanja rutin



pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), meskipun demikian secara umum rata-rata IKBR Kabupaten Agam masih rendah, yaitu sebesar 5,66 persen. Nilai IKBR tertinggi Kabupaten Agam sebelum otonomi daerah terjadi pada tahun 2007, yaitu mencapai 8,00 persen. Hal ini berarti sebesar 8,00 persen belanja rutin pemerintah Kabupaten Agam mampu dibiayai oleh PAD Kabupaten Agam. Sedangkan, IKBR Kabupaten Agam terendah terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 2,78 persen. Rendahnya IKBR pada tahun ini disebabkan karena belum berfungsi efektifnya otonomi daerah dan sebagian pembiayaan daerah masih ditentukan oleh pemerintah pusat. Apabila kedua rata-rata indeks kemampuan belanja rutin (IKBR) tersebut dibandingkan maka indeks kemampuan belanja rutin (IKBR) setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah memang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari rata-ratanya yang sebesar 5,25 persen sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sebesar 5,66 persen setelah pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan persentase rata-rata indeks kemampuan belanja rutin (IKBR) tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap perkembangan belanja rutin di Kabupaten Agam.

### **5.1.2 Uji Beda terhadap Indeks Kemampuan Belanja Rutin**

Setelah dilakukan uji *compare mean* (Perbandingan Hasil Rata-rata) terhadap indeks kemampuan belanja rutin (IKBR) dalam jangka waktu sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut:



## T-Test

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	IKBR Sebelum Otda - IKBR Sesudah Otda	-.33625	2.78559	.98485	-2.66506	1.99256	-.341	7	.743

Dari hasil uji yang menggunakan pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen) dan data yang digunakan adalah timeseries 17 tahun dengan rincian 8 tahun sebelum otonomi daerah dan 9 tahun setelah otonomi daerah. Diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left. \begin{array}{l} t_{\text{hitung}} = -0,341 \\ t_{\text{tabel}} = 2,131 \end{array} \right\} t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dikarenakan hasil  $t_{\text{hitung}}$  lebih kecil dibandingkan hasil  $t_{\text{tabel}}$ . Selain itu karena Sig. (2-tailed)  $0,743 > 0,05$  berarti hasilnya tidak signifikan.

Dari hasil pengujian Uji Beda terhadap IKBR sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa proporsi PAD di Kabupaten Agam dalam membiayai belanja rutinnya baik sebelum adanya otda maupun setelah pelaksanaan otda tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut berarti tidak ada pengaruh dari ada atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap kemampuan belanja rutinnya. Jadi, selama periode 1993-2009 baik sebelum atau setelah otonomi daerah Indeks kemampuan belanja rutin

(IKBR) pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), meskipun demikian secara umum IKBR Kabupaten Agam masih tergolong rendah. Maka pemerintah daerah Kabupaten Agam hendaknya berupaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PAD agar mampu membiayai belanja rutinnya dan tidak bergantung dengan pemerintah pusat.

### 5.1.3 Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan (IKBP)

Indeks kemampuan belanja pembangunan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan PAD dalam membiayai belanja pembangunan. Semakin tinggi peranan PAD dalam membiayai belanja pembangunan, maka akan semakin mandiri daerah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis guna pembangunan daerah.

Selama periode 1993-2009 Indeks belanja pembangunan Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), yang secara keseluruhan rata-rata indeks belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar 12,29 persen <sup>(Lampiran 2)</sup>. Ini berarti selama periode 1993-2009 belanja pembangunan di Kabupaten Agam mampu dibiayai sendiri sebesar 12,29 persen, angka ini berada pada kategori yang masih rendah, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.3.**  
**Perkembangan Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan Pemerintah**  
**Kabupaten Agam Sebelum Otonomi Daerah**  
**Periode Tahun 1993 - 2000**

Tahun	Komponen Pengukuran Indeks Kemampuan Pembangunan		Indeks Kemampuan Pembangunan	Keterangan
	PAD Kab. Agam (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	IKBP (%)	
1993	857.893.000	9.169.205.000	9,35	Rendah
1994	1.325.442.000	9.636.811.000	13,75	Rendah
1995	1.578.153.000	10.100.600.000	15,62	Rendah
1996	1.501.314.000	10.893.678.000	13,78	Rendah
1997	1.485.740.000	11.607.010.000	12,80	Rendah
1998	1.326.463.000	19.882.938.000	6,67	Rendah
1999	1.967.151.000	23.327.189.000	8,43	Rendah
2000	2.444.396.000	25.182.761.000	9,70	Rendah
<b>Rata-rata</b>			<b>11,26</b>	<b>Rendah</b>

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 5.3 di atas tergambar bahwa selama periode 1993-2000 atau sebelum otonomi daerah Indeks kemampuan belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), meskipun demikian secara umum rata-rata IKBP Kabupaten Agam masih rendah, yaitu sebesar 11,26 persen. Nilai IKBP tertinggi Kabupaten Agam sebelum otonomi daerah terjadi pada tahun 1995, yaitu mencapai 15,62 persen. Hal ini berarti sebesar 15,62 persen belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Agam mampu dibiayai oleh PAD Kabupaten Agam. Sedangkan, IKBP Kabupaten Agam terendah terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 6,67 persen. Rendahnya IKBP pada tahun ini dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang cenderung mengalami penurunan akibat terjadinya krisis moneter yang melanda

negara Indonesia. Dimana perekonomian baik itu terhadap negara maupun daerah mengalami stagnasi. Dengan buruknya perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 1998, secara tidak langsung juga terefleksi pada perkembangan ekonomi Kabupaten Agam.

**Tabel 5.4.**  
**Perkembangan Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan Pemerintah**  
**Kabupaten Agam Setelah Otonomi Daerah**  
**Periode Tahun 2000 - 2009**

Tahun	Komponen Pengukuran Indeks Kemampuan Pembangunan		Indeks Kemampuan Pembangunan	Keterangan
	PAD Kab. Agam (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	IKBP (%)	
2001	3.563.438.000	38.280.578.000	9,30	Rendah
2002	4.593.656.000	61.143.734.000	7,51	Rendah
2003	11.718.358.000	52.492.106.000	22,32	Rendah
2004	11.316.909.000	66.798.230.000	16,94	Rendah
2005	11.545.693.000	65.477.829.000	17,63	Rendah
2006	17.292.121.000	134.714.814.000	12,87	Rendah
2007	22.230.477.000	205.733.610.000	10,80	Rendah
2008	24.180.990.000	210.814.070.000	11,47	Rendah
2009	25.956.303.000	257.693.148.000	10,07	Rendah
Rata-rata			13,21	Rendah

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 5.4 di atas tergambar bahwa selama periode 2001-2009 atau setelah otonomi daerah Indeks kemampuan belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), meskipun demikian secara umum rata-rata IKBP Kabupaten Agam masih rendah, yaitu sebesar 13,21. Nilai IKBP tertinggi Kabupaten Agam sebelum otonomi daerah terjadi pada tahun 2003, yaitu mencapai 22,32 persen. Hal ini berarti



sebesar 22,32 persen belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Agam mampu dibiayai oleh PAD Kabupaten Agam. Sedangkan, IKBP Kabupaten Agam terendah terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 7,51 persen. Rendahnya IKR pada tahun ini disebabkan karena belum berfungsi efektifnya otonomi daerah dan sebagian pembiayaan daerah masih ditentukan oleh pemerintah pusat.

Apabila kedua rata-rata indeks kemampuan belanja pembangunan (IKBP) tersebut dibandingkan maka indeks kemampuan belanja pembangunan (IKBP) setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah memang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari rata-ratanya yang sebesar 11,26 persen sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sebesar 13,21 persen setelah pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan persentase rata-rata indeks kemampuan belanja pembangunan (IKBP) tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap perkembangan belanja pembangunan di Kabupaten Agam.

#### **5.1.4 Uji Beda terhadap Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan**

Setelah dilakukan uji *compare mean* ( Perbandingan Hasil Rata-rata ) terhadap indeks kemampuan belanja pembangunan ( IKBP ) dalam jangka waktu sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut :



## T-Test

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	IKBP Sebelum Otda - IKBP Setelah Otda	-2.34250	4.14791	1.46651	-5.81024	1.12524	-1.597	7	.154

Dari hasil uji yang menggunakan pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen) dan data yang digunakan adalah timeseries 17 tahun dengan rincian 8 tahun sebelum otonomi daerah dan 9 tahun setelah otonomi daerah. Diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left. \begin{array}{l} t_{\text{hitung}} = -1,597 \\ t_{\text{tabel}} = 2,131 \end{array} \right\} t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dikarenakan hasil  $t_{\text{hitung}}$  lebih kecil dibandingkan hasil  $t_{\text{tabel}}$ . Selain itu karena Sig. (2-tailed)  $0,154 > 0,05$  berarti hasilnya tidak signifikan.

Dari hasil pengujian Uji Beda terhadap IKBP sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa proporsi PAD di Kabupaten Agam dalam membiayai belanja pembangunannya baik sebelum adanya otda maupun setelah pelaksanaan otda tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut berarti tidak ada pengaruh dari ada atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap kemampuan belanja pembangunannya. Jadi, selama periode 1993-2009 baik sebelum atau setelah otonomi daerah Indeks kemampuan

belanja rutin pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi (naik turun), meskipun demikian secara umum IKBR Kabupaten Agam masih tergolong rendah. Maka pemerintah daerah Kabupaten Agam hendaknya berupaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PAD agar mampu membiayai belanja rutinnya dan tidak bergantung dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan tabel diatas secara rata-rata selama periode 1993-2009 indeks belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar 12,29 persen. Ini berarti selama periode 1993-2009 belanja pembangunan di Kabupaten Agam mampu dibiayai sendiri sebesar 12,29 persen, angka ini berada pada kategori yang masih rendah.

Bila diperhatikan kondisi nilai indeks belanja rutin dan belanja pembangunan menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap bantuan pemerintah pusat. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam belum mampu mandiri dalam bidang keuangan daerah. Apalagi penghitungan indeks belanja di hitung secara total, maka indeks ketergantungan pemerintah Kabupaten Agam dalam membiayai pembangunannya akan semakin tinggi.

## 5.2 Elastisitas PAD Kabupaten Agam

Secara teoritis perubahan APBD yang tercermin dari perubahan total pendapatan akan direspon secara positif oleh perubahan PAD. Hal ini disebabkan APBD merupakan instrumen fiskal yang positif dalam mendorong kegiatan pembangunan di daerah. Melalui peningkatan kegiatan pembangunan di daerah

maka diharapkan potensi pendapatan masyarakat akan meningkat dan mendorong pula peningkatan kemampuan masyarakat di dalam membayar berbagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Elastisitas PAD terhadap perubahan APBD adalah reaksi atau respon perubahan PAD sebagai akibat perubahan APBD. APBD yang dimaksudkan disini adalah total penerimaan daerah.

Secara keseluruhan selama periode 1993-2009 elastisitas perubahan PAD sebagai akibat perubahan APBD Kabupaten Agam bersifat elastis. Secara rata-rata koefisien elastisitas PAD terhadap perubahan APBD yang tercermin dari total pendapatan daerah adalah sebesar 1,98 persen (Lampiran 3).

**Tabel 5.5.**  
**Elastisitas Penerimaan PAD Terhadap Perubahan APBD**  
**Kabupaten Agam Sebelum Otonomi Daerah**  
**Tahun 1993-2000**

Tahun	APBD (Rp)	(%)	PAD (Rp)	(%)	Elastisitas	Keterangan
1993	28.240.189.000	-	857.893.000	-	-	-
1994	30.175.216.000	6,85	1.325.442.000	54,49	7,95	Elastis
1995	33.808.914.000	12,04	1.578.153.000	19,06	1,58	Elastis
1996	37.269.481.000	10,23	1.501.314.000	-4,86	-0,47	In-elastis
1997	40.527.685.000	8,74	1.485.740.000	-1,03	-0,11	In-elastis
1998	55.588.036.000	37,16	1.326.463.000	-10,72	-0,28	In-elastis
1999	81.553.282.000	46,71	1.967.151.000	48,30	1,03	Elastis
2000	73.723.532.000	-10,15	2.444.396.000	24,26	-2,39	In-elastis
<b>Rata-rata</b>		<b>15,94</b>		<b>18,5</b>	<b>1,04</b>	<b>Elastis</b>

Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5.5. tersebut terlihat bahwa selama periode tahun 1993-2000 atau sebelum adanya otonomi daerah elastisitas perubahan PAD sebagai akibat perubahan APBD Kabupaten Agam, yang bersifat elastis terjadi pada tahun 1994 sebesar 7,95 persen dan tahun 1995 sebesar 1,58 persen serta pada tahun 1999 adalah sebesar 1,03. Sedangkan, untuk tahun 1996-1998 serta tahun 2000

terjadi kondisi in-elastis dimana pada tahun tersebut terjadi penurunan penerimaan PAD di Kabupaten Agam.

**Tabel 5.6.**  
**Elastisitas Penerimaan PAD Terhadap Perubahan APBD**  
**Kabupaten Agam Setelah Otonomi Daerah**  
**Tahun 2000-2009**

Tahun	APBD (Rp)	(%)	PAD (Rp)	(%)	Elastisitas	Keterangan
2001	181.044.135.000	147,07	3.563.438.000	45,77	0,31	Elastis
2002	225.801.877.000	41,29	4.593.656.000	28,91	0,7	In-elastis
2003	276.075.335.000	22,26	11.718.358.000	155,09	6,96	Elastis
2004	275.310.004.000	0,28	11.316.909.000	- 3,42	12,46	Elastis
2005	294.105.129.000	6,82	11.545.693.000	2,02	0,29	In-elastis
2006	459.931.846.000	56,38	17.292.121.000	49,77	0,88	In-elastis
2007	270.583.071.000	24,05	22.230.477.000	28,55	1,18	Elastis
2008	671.637.623.000	17,6	24.180.990.000	8,77	0,49	In-elastis
2009	656.607.510.000	6,41	25.956.303.000	7,34	1,14	Elastis
<b>Rata-rata</b>		<b>35,80</b>		<b>36,63</b>	<b>2,71</b>	<b>Elastis</b>

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 5.6. tersebut terlihat bahwa selama periode tahun 1993-2000 atau setelah adanya otonomi daerah, elastisitas perubahan PAD sebagai akibat perubahan APBD Kabupaten Agam, yang bersifat elastis dengan angka persentase tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 12,46 persen. Tingginya pencapaian tersebut disebabkan karena adanya pengaruh dari pelaksanaan secara efektif desentralisasi fiskal.

Apabila kedua rata-rata koefisien elastisitas tersebut dibandingkan maka koefisien elastisitas setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah memang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari rata-ratanya yang sebesar 2,71 persen sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sebesar 1,04 persen setelah pelaksanaan otonomi daerah, yang mana keduanya berada pada



kategori elastis. Perbedaan persentase rata-rata koefesien elastisitas tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap respon PAD sebagai akibat perubahan APBD di Kabupaten Agam.

### 5.3 Uji Beda terhadap Elastisitas PAD

Setelah dilakukan uji *compare mean*. ( Perbandingan Hasil Rata-rata ) terhadap Elastisitas penerimaan PAD terhadap perubahan APBD dalam jangka waktu sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

#### T-Test

Paired Samples Test

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Ekastisitas Sebelum Otoda - Elastisitas Setelah Otoda	-1.18250	5.58316	1.97394	-5.85014	3.48514	-.599	7	.568

Dari hasil uji yang menggunakan pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen) dan data yang digunakan adalah timeseries 17 tahun dengan rincian 8 tahun sebelum otonomi daerah dan 9 tahun setelah otonomi daerah. Diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left. \begin{array}{l} t_{\text{hitung}} = -0,599 \\ t_{\text{tabel}} = 2,131 \end{array} \right\} t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$



Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dikarenakan hasil  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan hasil  $t_{tabel}$ . Selain itu karena Sig. (2-tailed)  $0,568 > 0,05$  berarti hasilnya tidak signifikan.

Dari hasil pengujian Uji Beda terhadap elastisitas PAD terhadap APBD sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa baik sebelum adanya otda maupun setelah pelaksanaan otda tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut berarti tidak ada pengaruh dari ada atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap elastisitas PAD pada perubahan APBD di Kabupaten Agam. Walaupun terjadi perubahan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah total penerimaan daerah (APBD). Hal ini dikarenakan sumber penerimaan daerah Kabupaten Agam tidak hanya bersumber dari PAD tetapi masih ada sumber penerimaan lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap APBD seperti dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun demikian secara umum persentase elastisitas Kabupaten Agam selama periode 1993-2009 baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah sudah tergolong elastis dengan rata-rata sebesar 1,98 persen.

#### **5.4 Efisiensi PAD Kabupaten Agam**

Efisiensi penerimaan PAD adalah perbandingan antara biaya pungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD yang diproxikan dengan belanja rutin Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Agam.

Semakin kecil persentase koefisien efisiensi penerimaan PAD, maka akan semakin efektif pemungutan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam. Sebaliknya semakin besar persentase biaya pemungutannya akan semakin tidak efisien pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sumber-sumber penerimaan PAD. Selama periode 1993-2009 koefisien efisiensi penerimaan PAD Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Untuk lebih jelasnya keadaan efisiensi penerimaan PAD di Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.7.**  
**Efisiensi Penerimaan PAD Kabupaten Agam**  
**Sebelum Otonomi Daerah**  
**Tahun 1993-2000**

Tahun	Total Penerimaan PAD (Rp)	Total Biaya Pungut PAD (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
1993	857,893,000	545,000,000	63.53	Kurang Efisien
1994	1,325,442,000	456,000,000	34.40	Efisien
1995	1,578,153,000	569,000,000	36.05	Efisien
1996	1,501,314,000	676,000,000	45.03	Cukup Efisien
1997	1,485,740,000	198,000,000	13.33	Sangat Efisien
1998	1,326,463,000	261,000,000	19.68	Sangat Efisien
1999	1,967,151,000	462,000,000	23.49	Efisien
2000	2,444,396,000	524,000,000	21.44	Efisien
Rata-rata			32.12	Efisien

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 5.7 tersebut yang menunjukkan efisiensi pemungutan PAD di Kabupaten Agam selama periode tahun 1993 – 2000 atau sebelum terlaksananya otonomi daerah secara rata-rata adalah sebesar 32,12 persen, dimana pada tahun 1993 kinerja pemungutan PAD di Kabupaten Agam masih kurang efisien dengan persentase sebesar 63,53 persen. Sedangkan untuk tahun

1994-2000 kinerja pemungutan PAD di Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang cukup efisien menuju efisien bahkan menjadi sangat efisien.

**Tabel 5.8.**  
**Efisiensi Penerimaan PAD Kabupaten Agam**  
**Setelah Otonomi Daerah**  
**Tahun 2000-2009**

Tahun	Total Penerimaan PAD (Rp)	Total Biaya Pungut PAD (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
2001	3,563,438,000	2,469,000,000	69.29	Kurang Efisien
2002	4,593,656,000	4,032,000,000	87.77	Tidak Efisien
2003	11,718,358,000	3,479,000,000	29.69	Efisien
2004	11,316,909,000	3,127,000,000	27.63	Efisien
2005	11,545,693,000	3,008,000,000	26.05	Efisien
2006	17,292,121,000	3,975,000,000	22.99	Efisien
2007	22,230,477,000	3,478,000,000	15.65	Sangat Efisien
2008	24,180,990,000	3,778,000,000	15.62	Sangat Efisien
2009	25,956,303,000	4,174,000,000	16.08	Sangat Efisien
Rata-rata			34.53	Efisien

Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5.8 tersebut tergambar bahwa efisiensi pemungutan PAD di Kabupaten Agam selama periode tahun 2000-2009 atau setelah terlaksananya otonomi daerah secara rata-rata adalah sebesar 34,53 persen, dimana pada tahun 2003-2006 kinerja pemungutan PAD di Kabupaten Agam sudah efisien, bahkan pada tahun 2007-2009 kinerja pemungutan PAD di Kabupaten Agam sudah menjadi sangat efisien.

Berdasarkan kedua tabel di atas tergambar bahwa secara keseluruhan selama periode 1993-2009 efisiensi pemungutan PAD di Kabupaten Agam secara rata-rata adalah sebesar 33,39 % <sup>(Lampiran 4)</sup>, atau berada pada tingkatan yang sudah

efisien. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengusahaan sumber-sumber penerimaan PAD sudah mulai dilakukan dengan seefisien mungkin.

Efisiensi yang terkecil terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 87,77%, hal ini berarti biaya pungut PAD di Kabupaten Agam hanya sebesar 87,77 % dari total penerimaan PAD atau berada pada kategori yang tidak efisien. Rendahnya efisiensi pada tahun ini tidak terlepas dari rendahnya biaya rutin yang dikeluarkan oleh Dispenda, karena sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan tahun 2000 sebagian besar biaya pengeluaran rutin masih dibiayai oleh pemerintah pusat, oleh karenanya banyak kegiatan rutin yang belum diagendakan atau belum terprogram. Sedangkan, Efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 1997, yaitu sebesar 13,33 %. Tingginya efisiensi pada tahun ini disebabkan karena masih rendahnya penerimaan PAD karena belum teridentifikasinya sumber-sumber PAD di Kabupaten Agam.

Apabila kedua rata-rata koefisien efisiensi tersebut dibandingkan maka koefisien efisiensi setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah memang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari rata-ratanya yang sebesar 32,12 persen sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sebesar 34,53 persen setelah pelaksanaan otonomi daerah, yang mana keduanya berada pada kategori efisien.

## **5.5 Uji Beda terhadap Efisiensi PAD**

Setelah dilakukan uji *compare mean* ( Perbandingan Hasil Rata-rata ) terhadap Efisiensi penerimaan PAD terhadap perubahan APBD dalam jangka



waktu sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

### T-Test

		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		T	Df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Efisiensi Sebelum Otda - Efisiensi Setelah Otda	-4.71750	21.76103	7.69369	-22.91018	13.47518	-.613	7	.559

Dari hasil uji yang menggunakan pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen) dan data yang digunakan adalah timeseries 17 tahun dengan rincian 8 tahun sebelum otonomi daerah dan 9 tahun setelah otonomi daerah. Diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left. \begin{array}{l} t_{\text{hitung}} = -0,613 \\ t_{\text{tabel}} = 2,131 \end{array} \right\} t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dikarenakan hasil  $t_{\text{hitung}}$  lebih kecil dibandingkan hasil  $t_{\text{tabel}}$ . Selain itu karena Sig. (2-tailed)  $0,559 > 0,05$  berarti hasilnya tidak signifikan.

Dari hasil pengujian Uji Beda terhadap efisiensi PAD sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar baik sebelum adanya otda maupun setelah pelaksanaan otda tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut berarti tidak ada pengaruh dari ada atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap efisiensi PAD. Dari data terlihat bahwa biaya pemungutan PAD di Kabupaten Agam cenderung masih cukup besar yang



mengakibatkan semakin tidak efisiennya pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sumber-sumber penerimaan PAD.

### 5.6 Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Agam

Berbeda dengan efisiensi pemungutan PAD di Kabupaten Agam, efektivitas adalah perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PAD. Semakin tinggi persentase efektivitas penerimaan PAD, maka akan semakin efektif dalam pemungutan sumber-sumber PAD. Selama periode 1993-2009 efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan yang fluktuasi, namun demikian kecenderungannya di atas 100%. Selama kurun waktu 1993-2009 efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Agam secara keseluruhan rata-ratanya adalah sebesar 99,43%<sup>(Lampiran 5)</sup> berada pada kategori yang efektif. Berarti pemungutan PAD di Kabupaten Agam mampu direalisasikan sebesar 99,43% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 5.9.**  
**Efektivitas Pencapaian Target PAD Kabupaten Agam**  
**Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1993-2000**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
1993	914.905.000	857.893.000	93,76	Efektif
1994	1.574.666.000	1.325.442.000	84,17	Cukup Efektif
1995	2.042.823.000	1.578.153.000	77,25	Kurang Efektif
1996	1.921.795.000	1.501.314.000	78,12	Kurang Efektif
1997	1.817.213.000	1.485.740.000	81,75	Cukup Efektif
1998	1.504.628.000	1.326.463.000	88,15	Cukup Efektif
1999	1.867.432.000	1.967.151.000	105,33	Sangat Efektif
2000	2.100.769.000	2.444.396.000	116,35	Sangat Efektif
Rata-rata			90,61	Efektif

Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5.9 diatas terlihat bahwa selama periode 1993-2000 atau sebelum adanya pelaksanaan adanya otonomi daerah, efektifitas pemungutan PAD secara rata-rata persentasenya adalah sebesar 90,61 persen yang berada pada kategori efektif. Efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Agam tertinggi terjadi pada tahun 2000, yaitu sebesar 116,35 persen. Tingginya efektivitas pemungutan PAD pada tahun ini sebagai dampak dari giatnya pemerintah Kabupaten Agam dalam mengejar target penerimaan PAD, terlebih peran PAD sangat penting guna membiayai belanja pembangunan di Kabupaten Agam. Sedangkan, efektivitas terendah terjadi pada tahun 1995, yaitu sebesar 77,25 persen. Meskipun merupakan koefisien terendah, namun pemungutannya sudah dilakukan secara efektif, namun demikian persentase pencapaian ini masih memperlihatkan rendahnya kinerja aparat terkait dalam melakukan optimalisasi pemungutan PAD yang berasal dari sumber-sumber penerimaannya.

**Tabel 5.10.**  
**Efektivitas Pencapaian Target PAD Kabupaten Agam**  
**Setelah Otonomi Daerah**  
**Tahun 2000-2009**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2001	3.473.286.000	3.563.438.000	102,59	Sangat Efektif
2002	4.110.235.000	4.593.656.000	111,76	Sangat Efektif
2003	10.270.120.000	11.718.358.000	114,1	Sangat Efektif
2004	10.309.196.000	11.316.909.000	109,77	Sangat Efektif
2005	11.200.886.000	11.545.693.000	103,07	Sangat Efektif
2006	15.997.784.000	17.292.121.000	108,09	Sangat Efektif
2007	20.819.860.000	22.230.477.000	106,77	Sangat Efektif
2008	23.370.585.000	24.180.990.000	103,46	Sangat Efektif
2009	24.509.742.000	25.956.303.000	105,90	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>107,28</b>	<b>Sangat Efektif</b>

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 5.10 diatas terlihat bahwa selama periode 2000-2009 atau setelah adanya adanya pelaksanaan otonomi daerah, efektifitas pemungutan PAD secara rata-rata persentasenya adalah sebesar 107,28 persen yang berada pada kategori sangat efektif. Efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Agam tertinggi terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 111,76 persen. Sedangkan, efektifitas terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 102,9 persen. Meskipun merupakan koefisien terendah, namun pemungutannya sudah dilakukan secara efektif, namun demikian persentase pencapaian ini masih memperlihatkan rendahnya kinerja aparat terkait dalam melakukan optimalisasi pemungutan PAD yang berasal dari sumber-sumber penerimaanya.

Apabila kedua rata-rata koefisien efektifitas tersebut dibandingkan maka koefisien efektifitas setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah memang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari rata-ratanya yang sebesar 90,61 persen (kategori efektif) sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sebesar 107,28 persen (kategori sangat efektif) setelah pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan persentase rata-rata koefisien efektifitas tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap semakin efektifnya pemungutan sumber-sumber PAD di Kabupaten Agam.

#### **5.6.1 Uji Beda terhadap Efektifitas PAD**

Setelah dilakukan uji *compare mean* ( Perbandingan Hasil Rata-rata ) terhadap efektifitas pemungutan PAD dalam jangka waktu sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

## T-Test

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Efektifitas Sebelum Otda - Efektifitas Setelah Otda	-16.84125	16.69120	5.90123	-30.79544	-2.88706	2.854	7	.025

Dari hasil uji yang menggunakan pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen) dan data yang digunakan adalah timeseries 17 tahun dengan rincian 8 tahun sebelum otonomi daerah dan 9 tahun setelah otonomi daerah. Diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left. \begin{array}{l} t_{\text{hitung}} = 2,854 \\ t_{\text{tabel}} = 2,131 \end{array} \right\} t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dikarenakan hasil  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dibandingkan hasil  $t_{\text{tabel}}$ . Selain itu karena Sig. (2-tailed)  $0,025 < 0,05$  berarti hasilnya signifikan.

Dari hasil pengujian Uji Beda terhadap efektifitas PAD sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa setelah pelaksanaan otda telah terjadi perbedaan yang signifikan terhadap efektifitas PAD nya. Hal tersebut berarti adanya pengaruh dari pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap kinerja penegelolaan PAD yang mana sudah cukup efektif dalam pemungutan PAD nya.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama periode 1993-2009 Indeks kemampuan belanja rutin pemerintah Kabupaten Agam masih rendah, yaitu sebesar 5,47 persen dan indeks belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar 12,29 persen dimana angka ini berada pada kategori yang masih rendah. Dari hasil pengujian uji beda terhadap IKBR dan IKBP sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa proporsi PAD di Kabupaten Agam dalam membiayai belanja rutinnya dan biaya pembangunannya baik sebelum atau sesudah adanya otda tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut berarti tidak ada perbedaan dari ada atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap kemampuan belanja rutin dan belanja pembangunannya.
2. Secara rata-rata koefisien elastisitas PAD terhadap perubahan APBD yang tercermin dari total pendapatan daerah adalah sebesar 1,98 atau berada pada kategori yang elastis. Dari hasil pengujian uji beda elastisitas PAD terhadap APBD sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa baik sebelum adanya otda maupun setelah pelaksanaan otda tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut



berarti tidak ada perbedaan dari ada atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap elastisitas PAD pada perubahan APBD-nya.

3. Selama periode 1993-2009 koefisien efisiensi pemungutan PAD di Kabupaten Agam secara rata-rata adalah sebesar 33,39 %, atau berada pada tingkatan yang efisien. Dari hasil pengujian uji beda terhadap efisiensi PAD sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa baik sebelum adanya otda maupun setelah pelaksanaan otda tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut berarti tidak ada perbedaan dari ada atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap efisiensi PAD-nya.
4. Selama kurun waktu 1993-2009 koefisien efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Agam secara rata-rata adalah sebesar 99,43% atau berada pada kategori yang efektif. Dari hasil pengujian uji beda terhadap efektifitas PAD sebelum dan sesudah otda berarti secara tidak langsung tergambar bahwa setelah pelaksanaan otda telah ada perbedaan yang signifikan terhadap efektifitas PAD nya. Hal tersebut berarti adanya perubahan dari pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Agam terhadap kinerja penegelolaan PAD yang mana sudah cukup efektif dalam pemungutan PAD nya.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Mengingat kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di Kabupaten Agam tergolong rendah maka sebaiknya pemerintah daerah lebih kreatif dan lebih inovatif dalam mencari dan menggali potensi penerimaan PAD serta mengintensifkan pengelolaannya dengan melakukan pengawasan lebih ketat di lapangan agar tingkat kebocoran dapat ditekan serendah mungkin.
2. Mengingat ketergantungan pemerintah Kabupaten Agam terhadap bantuan pemerintah pusat tinggi, maka sebaiknya pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan melalui berbagai elemen pemerintah pusat agar memperoleh kucuran dana yang lebih besar dan mengupayakan dana perimbangan yang lebih adil.
3. Pemerintah Kabupaten Agam perlu melakukan upaya efisiensi dan mengefektifkan sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi, diversifikasi dan modifikasi sumber-sumber penerimaan PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1997, *Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Departemen Dalam Negeri*

\_\_\_\_\_, 1999, *Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah.*

\_\_\_\_\_, 1999, *Undang-undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*

\_\_\_\_\_, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

\_\_\_\_\_, 2000, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*

\_\_\_\_\_, 1962, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1962 Tentang BUMD Perusahaan Daerah*

\_\_\_\_\_, 2010, *Perhitungan PDRB Tahun 1993-2009, Bappeda dan BPS Kabupaten Agam, Agam*

\_\_\_\_\_, 2010, *Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 1993-2009, DPKAD Kabupaten Agam, Agam*

Abimayu, Muhammad, 2001, *Keuangan Negara dan Kebijakan Moneter*, FE-UI, Jakarta.

Arsyad, M.2000. *Desentralisasi Fiskal*. Jakarta : Gramedia.

Bachtiar.1992. *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Tesis S2 FE-UI.

Bintoro, Tjokroaminoto, 1995, *Perencanaan Pembangunan, LP 3ES*, Jakarta

Davey, K.J.,1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.

Depdagri, 1994, *Keppmendagri No.690.900.327.1996, “ Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan”*.

- \_\_\_\_\_, 2002, *Kepmendagri No. 29. 2002. "Strategi dan Prioritas APBD"*.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kepmendagri No. 59. 2007. "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah"*.
- Devas, Nick., Anne Both., Bryan Binder., Kenneth Davey., Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Djoyosubroto, 1991, *Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.
- Gaffar, A., 2000, "Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang", *Wacana*, Edisi 5, Tahun II, 31 – 46.
- Guritno Mangkoesobroto. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Häsibuan, 1991. *Analisis tentang Keuangan Daerah, EKI, Vol. XXXIV No. 1, 94 – 95.*
- Imam Bactiar. 2003. *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. Tesis S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jaya, W.K, 1996, "Analisis Potensi Keuangan Daerah", *Modul Program Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategis*, Kerjasama Ditjen PUOD dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Koswara, E., 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*, *CSIS XXIX No. 1, 51 – 52.*
- Lains, Alfian, 1995. "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru" , *Prisma* No. 4, 40 – 57.
- Mahi, R., 2000. "Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi", *Analisis CSIS, Jakarta, Tahun XXIX, No: 1, 54 – 56.*
- Mandica, 2001, *Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*, FE-UGM, Yogyakarta



- Mardiasmo, 2002, “ *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2002*”. Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta.
- Nisjar, Basri, Subri, 2003, *Otonomi dan Keuangan Daerah*, BP FE-UGM, Yogyakarta
- Pramono, , B., 2003, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap Terhadap Apresiasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi”, *Usahawan*, Tahun XXIX, Nomor 04, 3 – 13.
- Santoso.1995. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Di Kota Semarang*. Semarang : Tugas Akhir diploma III (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Saragi, F.X., 2003. “Kemandirian dan Otonomi Daerah”, *Jurnal Media Ekonomi dan Bisnis*, No. 1, Vol. XII, 1-7.
- Saragih, P.J, 1996, “Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah”, *Perencanaan Pembangunan*, Nomor 6, 36 – 43.
- Satrio, Panca. 2010. *Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda) (Studi Kasus: Kota Jambi)*. Tesis S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Jambi.
- Sukardi, 2001, *Ekonomi Pembangunan*, BP FE-UI, Jakarta
- Sukirno, Sadono.1994. “*Pengantar Teori Makro Ekonomi*”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, P.H, 1982. *Dasar-Dasar Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Widayat, Wahyu, 1994, “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN*, Yogyakarta, Vol VI, 23 –47.
- Yulianto. 2001. *Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda) (Studi Kasus: Kota Yogyakarta)*. Tesis S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta. Yogyakarta.



**Lampiran 1**  
**Indeks Kemampuan Belanja Rutin (IKBR)**  
**Kabupaten Agam Sebelum-Setelah Otoda**

Tahun	Komponen Pengukuran Indeks Kemampuan Rutin		Indeks Kemampuan Belanja Rutin	Keterangan
	PAD Kab. Agam (Rp)	Belanja Rutin (Rp)	IKBR (%)	
1993	857.893.000	18.818.037.000	4,55	Rendah
1994	1.325.442.000	20.360.931.000	6,50	Rendah
1995	1.578.153.000	23.144.112.000	6,81	Rendah
1996	1.501.314.000	25.767.341.000	5,82	Rendah
1997	1.485.740.000	28.361.887.000	5,23	Rendah
1998	1.326.463.000	35.705.098.000	3,71	Rendah
1999	1.967.151.000	54.668.053.000	3,59	Rendah
2000	2.444.396.000	42.110.048.000	5,80	Rendah
2001	3.563.438.000	124.971.869.000	2,85	Rendah
2002	4.593.656.000	164.658.143.000	2,78	Rendah
2003	11.718.358.000	195.129.796.000	6,00	Rendah
2004	11.316.909.000	208.511.773.000	5,42	Rendah
2005	11.545.693.000	211.769.351.000	5,45	Rendah
2006	17.292.121.000	217.433.488.000	7,95	Rendah
2007	22.230.477.000	277.848.369.000	8,00	Rendah
2008	24.180.990.000	386.538.609.000	6,25	Rendah
2009	25.956.303.000	417.693.250.000	6,21	Rendah
<b>Rata-rata pertahun</b>			<b>5,47</b>	<b>Rendah</b>

Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)

**Lampiran 2**  
**Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan (IKBP)**  
**Kabupaten Agam Sebelum-Setelah Otoda**

Tahun	Komponen Pengukuran Indeks Kemampuan Pembangunan		Indeks Kemampuan Belanja Pembangunan	Keterangan
	PAD Kab. Agam (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	IKBP (%)	
1993	857.893.000	9.169.205.000	9,35	Rendah
1994	1.325.442.000	9.636.811.000	13,75	Rendah
1995	1.578.153.000	10.100.600.000	15,62	Rendah
1996	1.501.314.000	10.893.678.000	13,78	Rendah
1997	1.485.740.000	11.607.010.000	12,80	Rendah
1998	1.326.463.000	19.882.938.000	6,67	Rendah
1999	1.967.151.000	23.327.189.000	8,43	Rendah
2000	2.444.396.000	25.182.761.000	9,70	Rendah
2001	3.563.438.000	38.280.578.000	9,30	Rendah
2002	4.593.656.000	61.143.734.000	7,51	Rendah
2003	11.718.358.000	52.492.106.000	22,32	Rendah
2004	11.316.909.000	66.798.230.000	16,94	Rendah
2005	11.545.693.000	65.477.829.000	17,63	Rendah
2006	17.292.121.000	134.714.814.000	12,87	Rendah
2007	22.230.477.000	205.733.610.000	10,80	Rendah
2008	24.180.990.000	210.814.070.000	11,47	Rendah
2009	25.956.303.000	257.693.148.000	10,07	Rendah
<b>Rata-rata pertahun</b>			<b>12,29</b>	<b>Rendah</b>

Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)

**Lampiran 3**  
**Elastisitas Penerimaan PAD Terhadap Perubahan APBD**  
**Kabupaten Agam Sebelum-Setelah Otonomi Daerah**  
**Periode Tahun 1993-2009**

Tahun	APBD (Rp)	(%)	PAD (Rp)	(%)	Elastisitas	Keterangan
1993	28.240.189.000	-	857.893.000	-	-	-
1994	30.175.216.000	6,85	1.325.442.000	54,49	7,95	Elastis
1995	33.808.914.000	12,04	1.578.153.000	19,06	1,58	Elastis
1996	37.269.481.000	10,23	1.501.314.000	-4,86	-0,47	In-elastis
1997	40.527.685.000	8,74	1.485.740.000	-1,03	-0,11	In-elastis
1998	55.588.036.000	37,16	1.326.463.000	-10,72	-0,28	In-elastis
1999	81.553.282.000	46,71	1.967.151.000	48,30	1,03	Elastis
2000	73.723.532.000	-10,15	2.444.396.000	24,26	-2,39	In-elastis
2001	181.044.135.000	147,07	3.563.438.000	45,77	0,31	Elastis
2002	225.801.877.000	41,29	4.593.656.000	28,91	0,7	In-elastis
2003	276.075.335.000	22,26	11.718.358.000	155,09	6,96	Elastis
2004	275.310.004.000	-0,28	11.316.909.000	-3,42	12,46	Elastis
2005	294.105.129.000	6,82	11.545.693.000	2,02	0,29	In-elastis
2006	459.931.846.000	56,38	17.292.121.000	49,77	0,88	In-elastis
2007	270.583.071.000	24,05	22.230.477.000	28,55	1,18	Elastis
2008	671.637.623.000	17,6	24.180.990.000	8,77	0,49	In-elastis
2009	656.607.510.000	6,41	25.956.303.000	7,34	1,14	Elastis
<b>Rata-rata</b>		<b>27,07</b>		<b>28,27</b>	<b>1,98</b>	<b>elastis</b>

Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)

**Lampiran 4**  
**Efisiensi Penerimaan PAD Kabupaten Agam**  
**Sebelum-Setelah Otonomi Daerah**  
**Periode Tahun 1993-2009**

Tahun	Total Penerimaan PAD (Rp)	Total Biaya Pungut PAD (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
1993	857,893,000	545,000,000	63.53	Kurang Efisien
1994	1,325,442,000	456,000,000	34.40	Efisien
1995	1,578,153,000	569,000,000	36.05	Efisien
1996	1,501,314,000	676,000,000	45.03	Cukup Efisien
1997	1,485,740,000	198,000,000	13.33	Sangat Efisien
1998	1,326,463,000	261,000,000	19.68	Sangat Efisien
1999	1,967,151,000	462,000,000	23.49	Efisien
2000	2,444,396,000	524,000,000	21.44	Efisien
2001	3,563,438,000	2,469,000,000	69.29	Kurang Efisien
2002	4,593,656,000	4,032,000,000	87.77	Tidak Efisien
2003	11,718,358,000	3,479,000,000	29.69	Efisien
2004	11,316,909,000	3,127,000,000	27.63	Efisien
2005	11,545,693,000	3,008,000,000	26.05	Efisien
2006	17,292,121,000	3,975,000,000	22.99	Efisien
2007	22,230,477,000	3,478,000,000	15.65	Sangat Efisien
2008	24,180,990,000	3,778,000,000	15.62	Sangat Efisien
2009	25,956,303,000	4,174,000,000	16.08	Sangat Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>33.39</b>	<b>Efisien</b>

Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)

**Lampiran 5**  
**Efektivitas Pencapaian Target PAD Kabupaten Agam**  
**Sebelum-Setelah Otonomi Daerah**  
**Periode Tahun 1993-2009**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
1993	914.905.000	857.893.000	93,76	Efektif
1994	1.574.666.000	1.325.442.000	84,17	Cukup Efektif
1995	2.042.823.000	1.578.153.000	77,25	Kurang Efektif
1996	1.921.795.000	1.501.314.000	78,12	Kurang Efektif
1997	1.817.213.000	1.485.740.000	81,75	Cukup Efektif
1998	1.504.628.000	1.326.463.000	88,15	Cukup Efektif
1999	1.867.432.000	1.967.151.000	105,33	Sangat Efektif
2000	2.100.769.000	2.444.396.000	116,35	Sangat Efektif
2001	3.473.286.000	3.563.438.000	102,59	Sangat Efektif
2002	4.110.235.000	4.593.656.000	111,76	Sangat Efektif
2003	10.270.120.000	11.718.358.000	114,1	Sangat Efektif
2004	10.309.196.000	11.316.909.000	109,77	Sangat Efektif
2005	11.200.886.000	11.545.693.000	103,07	Sangat Efektif
2006	15.997.784.000	17.292.121.000	108,09	Sangat Efektif
2007	20.819.860.000	22.230.477.000	106,77	Sangat Efektif
2008	23.370.585.000	24.180.990.000	103,46	Sangat Efektif
2009	24.509.742.000	25.956.303.000	105,90	Sangat Efektif
Rata-rata			99,43	Efektif

*Sumber : DPKAD Kabupaten Agam (Data Diolah)*



**PDRB Kabupaten Agam Tahun Anggaran 1993-2009 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**

No.	Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Pertanian	162192,21	172391,02	183329,15	197572,29	200328,74	191049,14	195547,33	202585,82
2	Pertambangan	23612,48	29755,29	31710,23	34118,66	36292,02	31435,29	31578,38	32055,71
3	Industri	90932,40	97115,80	107117,51	114423,96	121729,37	117529,83	119192,86	124139,36
4	Listrik dan Air bersih	4876,18	5843,87	6844,54	7752,92	9040,78	10066,41	10892,62	12548,48
5	Bangunan	30734,07	31975,73	34537,84	37466,65	39219,84	30530,80	27615,11	28109,42
6	Perd.Hotel & Rest	94854,35	100322,49	107309,97	114781,58	121341,53	119015,05	121937,75	125238,88
7	Peng & komunikasi	19878,73	21571,63	23639,45	25704,55	27323,56	26211,82	26991,75	29327,75
8	Keu & Persewaan	18329,17	20063,27	20783,94	21863,42	22840,98	21434,09	21079,96	21424,95
9	Jasa-jasa	75153,57	77877,85	82510,97	88544,86	92030,35	95313,18	97240,42	99796,34
	<b>Jumlah</b>	<b>1.384.844,79</b>	<b>1.481.756,91</b>	<b>1.590.051,79</b>	<b>1.708.366,25</b>	<b>1.776.217,83</b>	<b>1.709.095,82</b>	<b>1.744.952,40</b>	<b>1.800.687,86</b>

Sumber : Bappeda kabupaten agam Tahun 2010

No.	Sektor Ekonomi	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	589672,88	632012,12	685611,11	749063,79	813823,80	884512,79	962825,65	1040225,40	1096917,80
2	Pertambangan	76312,54	78399,82	80210,87	84654,54	88977,89	93586,76	99280,97	106488,76	110002,90
3	Industri	287728,79	296667,56	304965,84	314602,77	327923,50	341875,08	356518,76	372027,32	387838,48
4	Listrik dan Air bersih	15644,76	17974,54	18690,13	19839,07	21232,67	22752,34	24388,51	24910,27	26426,66
5	Bangunan	89677,54	92215,43	94327,17	98487,02	103554,88	108906,29	114550,99	121435,50	130640,31
6	Perd.Hotel & Rest	331924,46	346529,55	364414,82	383676,68	407574,24	432916,64	460400,98	492154,02	507251,21
7	Peng & komunikasi	84244,30	88118,81	92796,55	98710,51	102693,90	107251,63	112822,25	119724,38	128143,94
8	Keu & Persewaan	65238,75	70122,06	73690,57	78823,03	82437,83	86427,67	90581,59	96028,49	100294,40
9	Jasa-jasa	333346,12	340745,63	351940,57	362958,24	376942,98	390532,61	404696,88	419893,13	442355,98
	<b>Jumlah</b>	<b>1.873.790,14</b>	<b>1.962.785,52</b>	<b>2.066.647,63</b>	<b>2.190.815,65</b>	<b>2.325.161,69</b>	<b>2.468.761,80</b>	<b>2.626.066,59</b>	<b>2.792.887,28</b>	<b>2.929.871,68</b>

Sumber : Bappeda kabupaten agam Tahun 2010

## T-Test IKBR

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 IKR Sebelum Otoda	5.2512	8	1.20955	.42764
IKR Sesudah Otoda	5.5875	8	1.97967	.69992

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 IKR Sebelum Otoda & IKR Sesudah Otoda	8	-.496	.211

Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 IKBR Sebelum Otoda - IKBR Sesudah Otoda	-.33625	2.78559	.98485	-2.66506	1.99256	-.341	7	.743	

## T-Test IKBP

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 IKBP Sebelum Otoda	11.2625	8	3.14166	1.11075
IKBP Setelah Otoda	13.6050	8	4.95584	1.75215

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 IKBP Sebelum Otoda & IKBP Setelah Otoda	8	.553	.155

Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 IKBP Sebelum Otoda - IKBP Setelah Otoda	-2.34250	4.14791	1.46651	-5.81024	1.12524	-1.597	7	.154	



## T-Test ELASTISITAS PAD

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Ekastisitas Sebelum Otoda	1.7263	8	2.64423	.93488
	Elastisitas Setelah Otoda	2.9087	8	4.45748	1.57596

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Ekastisitas Sebelum Otoda & Elastisitas Setelah Otoda	8	-.183	.665

Paired Samples Test

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Ekastisitas Sebelum Otoda - Elastisitas Setelah Otoda	-1.18250	5.58316	1.97394	-5.85014	3.48514	-.599	7	.568

## T-Test EFISIENSI

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Efisiensi Sebelum Otoda	32.1188	8	16.34563	5.77905
	Efisiensi Setelah Otoda	36.8363	8	26.70036	9.44000

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Efisiensi Sebelum Otoda & Efisiensi Setelah Otoda	8	.580	.132

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			

**Paired Samples Test**

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Efisiensi Sebelum Otoda - Efisiensi Setelah Otoda	-4.71750	21.76103	7.69309	-22.91018	13.47518	-.613	7	.559

**T-Test UNTUK EFEKTIFITAS**

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Efektifitas Sebelum Otoda	90.6100	8	13.88557	4.90929
	Efektifitas Setelah Otoda	107.4513	8	4.27245	1.51054

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Efektifitas Sebelum Otoda & Efektifitas Setelah Otoda	8	-.569	.141

**Paired Samples Test**

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Efektifitas Sebelum Otoda - Efektifitas Setelah Otoda	-16.84125	16.69120	5.90123	-30.79544	-2.88706	2.854	7	.025